



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan dan tugas pembantuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor disusun terkait dengan Capaian Kinerja yang telah ditetapkan (*Performance result*) selama tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor melaksanakan 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tersebut bertujuan untuk memenuhi 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi, dengan Indikator Tujuan Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat.
2. Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat, dengan Indikator Sasaran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 disediakan anggaran sebesar Rp. 13.492.957.267 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.710.208.839 (94,20%).

Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan kedepannya, hasil yang ingin dicapai lebih bisa dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik seiring dengan tujuan mencapai *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dilimpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas akuntabilitas yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Parameter keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara interal maupun eksternal dengan lintas sektor serta sinergitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun (*constructive idea*) sangat kami perlukan bagi terwujudnya Laporan Kinerja yang obyektif, akuntabel dan akurat.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan selanjutnya.

Cibinong, 26 Februari 2026

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan



IWAN IRAWAN, S.E., M.Si
NIP. 197103061998031006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	I-4
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategi	II-13
2.2 Perjanjian Kinerja	II-18
2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025	II-18
2.2.2 Perjanjian Kinerja 2025	II-19
2.3 Rencana Anggaran	II-19
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	II-22
3.1.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	III-22
3.1.2 Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	III-28
BAB IV PENUTUP	V-34
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Layout Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	22
Gambar 3.2	Mind Map Interaktif SPKM2	27
Gambar 3.3	Layout Nilai Hasil Audit Kearsipan Internal (LAKI)	28
Gambar 3.4	Pemberian Penghargaan Nilai LAKI	29
Gambar 3.5	Pelaksanaan Desk ASKI	31

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan	6
Tabel 1.2	Kondisi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025	8
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana	9
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
Tabel 2.1	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025- 2029	16
Tabel 2.3	Tujuan ,Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Realisasi Rencana Kinerja Tahun 2025	32

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berbentuk Dinas memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Secara nominatif telah dikeluarkan Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Penyusunan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata cara Riviui atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan;
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Maksud dilakukannya penyusunan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tahun 2025 adalah wujud konkrit pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stake holder) atas kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, yang telah selaras dengan tujuan, sasaran, program prioritas RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

Tujuannya adalah:

- a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- b) Meningkatkan transparansi.
- c) Meningkatkan kualitas perencanaan strategis.
- d) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

1.4.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Arsip dan Perpustakaan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d) Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.4.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Pembinaan Kearsipan,

Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan, dan Bidang Perpustakaan, dengan susunan sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi Sub Bagian umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Bidang Pembinaan Kearsipan;
- d) Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan;
- e) Bidang Perpustakaan;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.

1.4.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Secara umum struktur organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Arsip dan Perpustakaan b. Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan d. Pelaksanaan reformasi birokrasi e. Pelaksanaan administrasi Dinas f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya
2	Sekretariat	Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja Sekretariat b. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan c. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas d. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum e. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas f. Pengelolaan keuangan Dinas g. Pengelolaan situs web Dinas h. Pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
3	Bidang Pembinaan Kearsipan	Membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi pembinaan dan pengawasan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan c. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pembinaan kearsipan d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kearsipan e. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan f. Pelaksanaan sosialisasi kearsipan g. Pelaksanaan audit dan penilaian hasil pengawasan kearsipan h. Pengelolaan data dan statistik di bidang kearsipan i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembinaan Kearsipan j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan

			k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
4	Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kearsipan, layanan pemanfaatan arsip dan pengelolaan sistem informasi kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan layanan pengelolaan arsip dinamis dan statis serta otomasi kearsipan c. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis d. Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip e. Pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip f. Pelaksanaan sistem informasi kearsipan g. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
5	Bidang Perpustakaan	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja Bidang Perpustakaan b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan, pengolahan bahan pustaka dan otomasi perpustakaan serta pembinaan dan pengembangan perpustakaan c. Pelaksanaan layanan perpustakaan d. Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta tenaga perpustakaan f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta tenaga perpustakaan g. Pelaksanaan pengembangan budaya gemar membaca h. Penyelenggaraan perpustakaan digital i. Pengembangan sistem informasi perpustakaan j. Pelaksanaan kerja sama perpustakaan k. Pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dan pelestarian fisik bahan perpustakaan l. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perpustakaan m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Berjalannya organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor didukung oleh pegawai sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang sebagai berikut:

TABEL 1.2
Kondisi Sumber Daya Manusia (Sdm)
Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025

JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
Kepala Dinas	1
Sekretaris Dinas	1
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian/Ketua Tim	9
Total	14
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH
Fungsional Umum	15
Pustakawan Ahli Muda	1
Pustakawan Ahli Pertama	1
Arsiparis Penyelia	1
Arsiparis Ahli Muda	1
Arsiparis Pertama	1
Arsiparis Ahli Madya	0
Arsiparis Pelaksana	4
Pranata Komputer Pelaksana	1
PPPK	10
PPPK Paruh Waktu	29
Non ASN	10
Total	74

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana

No.	Rincian	Satuan	Volume
1.	Jumlah armada Perpustakaan Keliling		
	a. Kendaraan roda 4	Unit / Tahun Pengadaan/Sumber Dana/Kondisi	5 Unit (Tahun 2010,2004,2020,2022/APBD/Baik), (Tahun 2011/APBD/Rusak)
	b. Kendaraan roda 2	Unit / Tahun Pengadaan/Sumber Dana/Kondisi	
	c. Kendaraan roda 3	Unit / Tahun Pengadaan/Sumber Dana/Kondisi	1 Unit Tahun/Hibah/Kurang Baik
	d. Titik layanan perpustakaan keliling	Titik layanan	120
2.	Peralatan/Perabot		
	a. Rak Buku	Buah	18
	b. Meja Baca	Buah	48
	c. Kursi Baca	Buah	63
	d. Komputer	Unit	26
	e. Printer	Unit	9
	f. Rak display majalah/buku baru	Buah	2
	g. Rak display surat kabar	Buah	1
	h. meja sirkulasi	Unit	2
	i. Locker	Buah	6
	j. Laci katalog	Buah	2
3.	Peralatan/Perabot Depot Arsip		
	a. Rak Tingkat Depot	Unit	14
	b. Rak Arsip Besi	Unit	56
	c. Penyedot Debu	Unit	2
	d. Roll O Pack	Unit	18
	e. Lemari Peta	Unit	10
	f. Brankas	Unit	2
	g. Pencacah Kertas	Unit	2
	h. Mobil Layanan Arsip	Unit	2
4.	Peralatan/Perabot Alih Media Arsip		
	a. Laptop	Unit	4
	b. Scanner F4	Unit	3
	c. Scanner Peta	Unit	1
	d. Snap Scan	Unit	2
	e. Server	Unit	1
	f. Kamera	Unit	1

Sarana operasional perpustakaan keliling didukung oleh 5 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda tiga, serta kendaraan roda dua sebagai penunjang, dengan jangkauan layanan pada 120 titik. Peralatan perpustakaan tersedia antara lain rak buku, meja dan kursi baca, komputer, printer, rak display, meja sirkulasi, loker, dan laci katalog dalam jumlah yang memadai.

Peralatan Depot Arsip meliputi rak arsip, roll o'pack, lemari peta, brankas, pencacah kertas, penyedot debu, serta mobil layanan arsip. Kegiatan alih media didukung laptop, berbagai jenis pemindai, server, dan kamera.

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk menunjang layanan perpustakaan dan kearsipan, meskipun masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan pada beberapa peralatan.

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum

Kedudukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan sebagai Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.

Kompleksitas penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan pada era otonomi daerah sampai saat ini secara fundamental semakin meningkat, karena peran pemerintahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akselerasinya harus dipercepat termasuk urusan kearsipan dan urusan perpustakaan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi pelaksanaan urusan kearsipan dan urusan perpustakaan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan perkembangannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis aktif berbasis IT pada Perangkat Daerah/Kecamatan;
- b) Masih minimnya minat budaya baca dan literasi masyarakat;

- c) Sarana dan prasarana layanan kearsipan dan perpustakaan yang belum proporsional;
- d) Akses dan pemerataan layanan perpustakaan dan kearsipan yang belum menjangkau keseluruhan wilayah;
- e) SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan masih minim secara kualitas maupun kuantitas;
- f) Minimnya kesadaran instansi maupun individu akan pentingnya pengelolaan arsip.

Isu strategis dalam implementasi kebijakan publik dapat merupakan masalah yang belum diselesaikan dan sebagai bagian dari peran utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang teridentifikasi adalah ***“Belum Optimalnya Tata Kelola Kearsipan Dan Budaya Literasi”***

1.5.1 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	Hasil Rekomendasi Per Komponen AKIP 2024	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Target
1.	<p>Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh nilai sebesar 22,05 atau 73,50% dari nilai maksimum sebesar 30,00. DAP Kabupaten Bogor telah memiliki Renstra 2024–2026 dan dokumen perencanaan kinerja, namun masih ditemukan kelemahan dalam perencanaan kinerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai. • Belum adanya dokumen monitoring rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pimpinan. • Belum adanya dokumentasi rapat, daftar hadir, dan 	<p>Memuat rumusan atau perhitungan dalam menentukan nilai atau capaian kinerja utama pada Renstra dan Renja DAP Kabupaten Bogor.</p>	<p>Menyusun rumusan dan metode perhitungan capaian kinerja utama yang terukur dan konsisten, lalu mengintegrasikannya ke dalam dokumen Renstra dan Renja DAP Kabupaten Bogor agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja secara berkelanjutan.</p>	<p>Dokumen Rencana Kerja telah memuat rumusan atau perhitungan nilai capaian kinerja utama.</p>

NO	Hasil Rekomendasi Per Komponen AKIP 2024	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Target
	notulen evaluasi capaian kinerja.			
2.	<p>2. Pengukuran Kinerja Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 21,08 atau 70,26% dari nilai maksimum sebesar 30,00. DAP Kabupaten Bogor telah memiliki Indikator Kinerja dan telah melaksanakan pengukuran kinerja, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengukuran kinerja, yaitu indikator tidak diukur secara berkala, sehingga kesulitan dalam:</p> <p>a. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai karena belum adanya dokumen monitoring rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pimpinan serta belum adanya dokumentasi rapat, daftar hadir, dan notulen evaluasi capaian kinerja;</p> <p>b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, namun belum ada laporan/jadwal/notulen rapat pembahasan monev laporan triwulan (evkin) yang membahas hambatan maupun pendorong capaian kinerja.</p>	Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh unit kerja, kemudian mendokumentasikan laporan/jadwal/notulen rapat pembahasan monev laporan triwulan (evkin), yang membahas hambatan maupun faktor pendorong capaian kinerja.	Menetapkan jadwal rutin pengukuran capaian kinerja setiap triwulan dengan melibatkan seluruh unit kerja, serta mendokumentasikan hasilnya dalam bentuk laporan, jadwal kegiatan, dan notulen rapat yang membahas hambatan serta faktor pendorong pencapaian kinerja.	Dokumen Evaluasi Kinerja yang lebih jelas, lengkap, dan termanfaatkan dengan baik.
3.	<p>3. Pelaporan Kinerja Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diperoleh nilai sebesar 10,28 atau 68,53% dari nilai maksimum sebesar 15,00. DAP Kabupaten Bogor telah melaksanakan pelaporan kinerja, namun masih ditemukan kelemahan dalam pelaporan kinerja, yaitu Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 belum mengimplementasikan mekanisme umpan untuk perbaikan yang berkelanjutan.</p>	Mengikutsertakan SDM pada DAP Kabupaten Bogor dalam sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan data realisasi capaian kinerja.	meningkatkan dan melaksanakan sosialisasi/diklat bagi SDM DAP Kabupaten Bogor terkait pengukuran dan pengumpulan data realisasi kinerja, guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaksana teknis di lapangan.	SDM DAP dapat memahami terkait: Pelaporan Kinerja, dan Meningkatkan kapasitas pelaksanaan teknis.
4.	<p>4. Akuntabilitas Kinerja Internal Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh nilai sebesar 17,50 atau 70,00% dari nilai maksimum sebesar 25,00. DAP Kabupaten Bogor telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam evaluasi internal yaitu kurangnya umpan balik dari evaluasi yang dilakukan untuk perbaikan kinerja.</p>	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi yang sudah ada dengan memastikan seluruh unit kerja secara aktif menginput data, menggunakan fitur yang sudah tersedia. Seperti Aplikasi E-Sakip, Aplikasi SIPADU dan Aplikasi Laporan Kinerja Bulanan DAP.	Evaluasi SAKIP lebih optimal, efektif, dan efisien.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sangat tergantung dengan adanya perencanaan yang disusun sebagai penjabaran lebih terperinci tentang apa yang akan dikerjakan kedepan dan menentukan serta menetapkan apa yang akan dicapai melalui suatu proses perencanaan strategis.

Penyusunan perencanaan strategis perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 123.

Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berbentuk Dinas memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Dengan memperhatikan kedudukan Dinas Arsip dan Perpustakaan tersebut, problematika perencanaan strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dapat dikatakan relatif besar berbanding dengan pelimpahan wewenang urusan

perpustakaan dan urusan kearsipan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

Urgensi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan problematika atau persoalan secara komprehensif dan mempertimbangkan juga harmonisasi dan sinergitas sesuai tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Perencanaan Strategis (RENSTRA) periode tahun 2025-2029 merupakan landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, secara fungsional harus terdapat hubungan secara konsisten dengan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, sehingga terjadi konsistensi dalam pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan diatas, dapat digambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten
Bogor Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	SATUAN	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK	%	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Terlindunginya kondisi fisik arsip yang bernilai guna	%	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan	%	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor mendukung tercapainya Sasaran 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi untuk Urusan Kearsipan dan Sasaran 2 : Meningkatkan akses layanan pendidikan untuk Urusan Perpustakaan.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Tujuan Daerah:
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan



Sasaran Daerah:
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Dan Budaya Literasi	Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Pengembangan Program Minat Budaya Baca Dan Literasi	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Kepada Masyarakat Khususnya Pelajar
			Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
			Kerjasama Dengan Stakeholder Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca
			Wajib Kunjung Perpustakaan
		Penyediaan Akses Dan Bahan Bacaan Dan Penyediaan Saprass Yang Proporsional	Penyediaan E-Book Dan E-Library
			Fasilitasi Dan Stimulasi Sarana Perpustakaan Kecamatan/Desa/Kel/TBM
			Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka Tercetak Maupun E-Book
			Menganalisa Kebutuhan Pemustaka
			Inovasi Layanan Perpustakaan
		Pemanfaatan Teknologi	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan
		Peningkatan Kualias SDM Pengelola Perpustakaan	Melaksanakan Bimtek Pembinaan Dan Pelatihan, FGD Dan Workshop Pengelolaan Perpustakaan
			Monitoring, Evaluasi, Supervisi, Stimulasi Pada Perpustakaan Diwilayah

Tujuan Daerah:
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia



Sasaran Daerah:
Meningkatnya akses layanan pendidikan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Penyusunan Instrumen/Pedoman Kearsipan:	Menyusun draft regulasi terkait pengelolaan kearsipan yang sesuai NSPK (Perbup Tata Naskah Dinas, JRA dll)
		Pengelolaan Arsip Dinamis	Menerapkan pengelolaan standar baku kearsipan pada Perangkat Daerah dengan menyusun daftar pertelaan arsip, pendampingan/asistensi pengelolaan arsip dinamis Aktif dan in-aktif pada PD/Kecamatan, Sosialisasi dan aistensi Pengelolaan arsip aktif surat masuk/keluar melalui aplikasi SRIKANDI, Pemeliharaan rutin/berkala arsip, penilaian dan pemusnahan arsip sesuai dengan JRA
		Pengelolaan Arsip Statis	Penyelamatan dan pelestarian koleksi arsip statis yang memiliki nilai sejarah, akuisis arsip statis yg tersebar di Instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Menyusun Daftar Arsip Statis, Input Koleksi arsip statis ke dalam Sistem SIKN dan JIKN sebagai akses layanan informasi arsip statis
		Pembinaan dan Pengawasan:	Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan monev/pengawasan pengelolaan kearsipan dan melakukan audit pengelolaan kearsipan internal pada Perangkat Daerah/Kecamatan dalam rangkat tertib pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
		Pemanfaatan Teknologi: Sistem Informasi Kearsipan (SIK): Menerapkan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi untuk pengelolaan arsip yang lebih efisien dan efektif. Digitalisasi Arsip: Melakukan digitalisasi arsip untuk mempermudah akses, penyimpanan, dan penyebaran informasi.	Pengelolaan sistem kearsipan yang terintegrasi, Penerapan pengelolaan arsip berbasis TI, Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kearsipan, Layanan alih media arsip

2.2 Perjanjian Kinerja

2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan strategis dan arah kebijakan diatas, perlu dilakukan penetapan Rencana Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang disesuaikan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja utama sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel. 2.3
Tujuan ,Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	RUMUS HITUNG
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	92,2	Tingkat capaian kinerja rata-rata NKPA (Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip) + Tingkat Capaian kinerja Rata-rata Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat / 2
2.	Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	Sedang	{(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)} x 100
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	AA (Sangat Memuaskan)	Rata-Rata Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal

2.2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yaitu Nilai Sakip dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Perjanjian Kinerja Pimpinan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi		Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	%	92,5
	Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	Sedang
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	AA (Sangat Memuaskan)

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, III dan IV sampai dengan pelaksana.

2.3. Rencana Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025. Adapun program dan anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan
Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	821.409.610,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Arsip	1.725.051.431,00	APBD
3.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	141.166.715,00	APBD
4.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10.360.000,00	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.794.969.511,00	APBD
	Jumlah	13.492.957.267,00	APBD

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

2.4.1 INLISLite

INLISLite adalah perangkat lunak (software) otomasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengelola perpustakaan dalam mengelola perpustakaan digital dan melayani koleksi digital.

2.4.2 IBOGORKAB

iBogorKab merupakan aplikasi perpustakaan digital yang diluncurkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sejak tahun 2021. Penggunaan iBogorKab semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini berdampak pada peningkatan kunjungan perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Setiap tahun dilaksanakan sosialisasi dan promosi aplikasi ini kepada para pelajar di perpustakaan-perpustakaan sekolah di Kabupaten Bogor. Koleksi perpustakaan digital juga semakin bertambah setiap tahunnya sehingga sangat mendukung dalam upaya peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Bogor yang berbasis Teknologi Informasi (TI).

2.4.3 Kabogoh Maca

Perangkat untuk membaca buku digital dengan mekanisme scan QR code. Dilengkapi dengan reader untuk membaca dan dashboard untuk mengelola konten dan monitoring penggunaan spot baca.

2.4.4 SRIKANDI

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi SRIKANDI merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor telah melaksanakan bimbingan teknis penggunaan SRIKANDI kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor dan melakukan pendampingan serta evaluasi penggunaan aplikasi SRIKANDI pada tahun 2025. Penggunaan SRIKANDI menjadi salah satu pendukung dalam pencapaian sasaran strategis pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi dan mendukung dalam pencapaian Indeks SPBE.

2.4.5 SIPALMA

Sistem Informasi Penyimpanan Alih Media Arsip merupakan aplikasi hasil inovasi yang digunakan dalam pengelolaan arsip digital dan merupakan inovasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. SIPALMA menjadi salah satu aplikasi yang memudahkan dalam pengelolaan arsip digital di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Pengembangan dan pemeliharaan telah dilaksanakan setiap tahunnya agar penggunaan SIPALMA ini dapat lebih optimal. Hal ini juga menjadi salah satu indikator digitalisasi arsip di Kabupaten Bogor dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

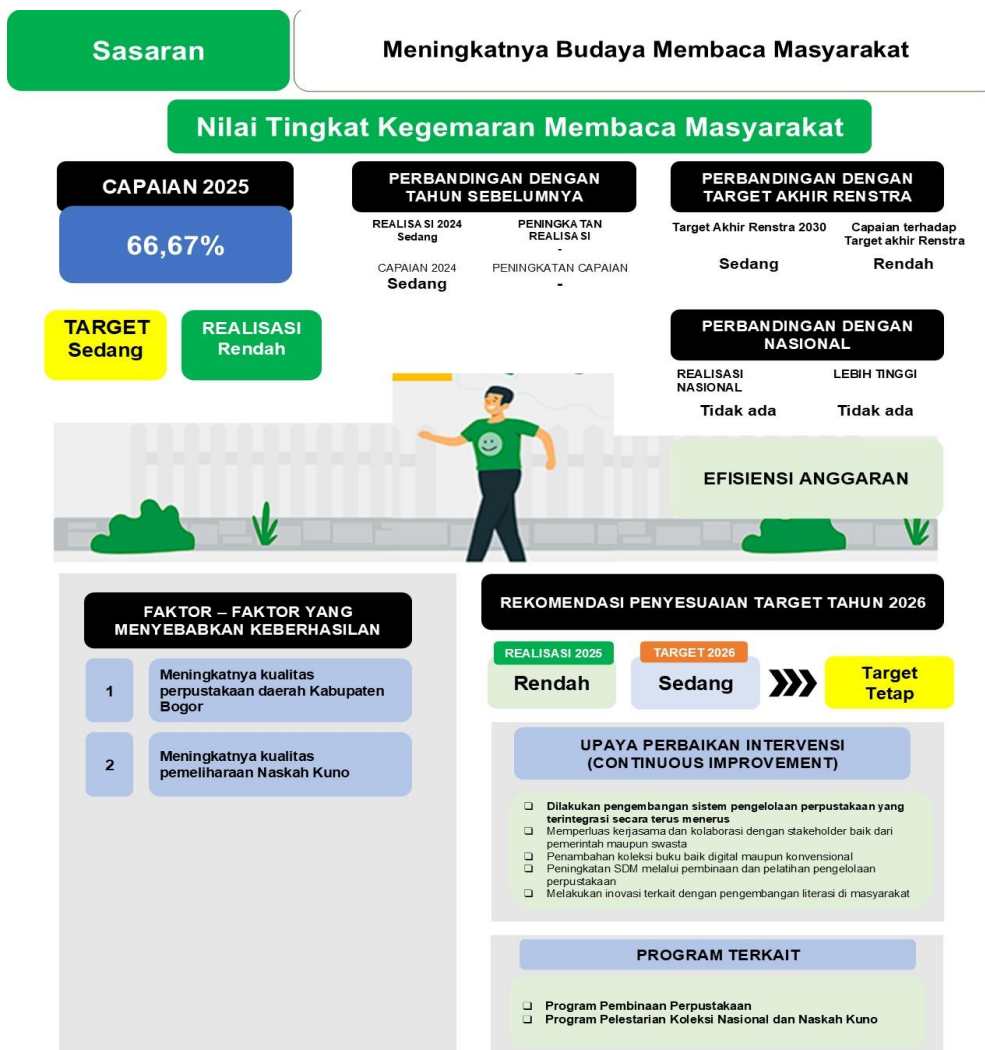
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tercermin dari capaian 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 83,33%. Salah satu indikator mencapai kinerja 100% dan indikator yang lain tidak mencapai 100%.

3.1.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca



Gambar 3.1 Layout Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tetap berupaya untuk meningkatkan Budaya Membaca Masyarakat. Hal ini ditandai Capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat hampir mencapai target yang ditentukan yaitu Kategori **Rendah** dengan Nilai 59.86% dari target capaian dengan kategori **Sedang** di angka 65.00%. Realisasi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut. Nilai Pra Membaca sebesar 53.49%, Nilai Saat Membaca sebesar 57.67% dan Nilai Pasca Membaca 65.54.

Penghitungan Nilai TKM tahun 2025 menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

Dilihat pada aspek realisasi, TKM mengalami penurunan sebesar 6.1% dari tahun 2024 sebesar 65.69% menjadi 59,86% pada tahun 2025. Dari segi pencapaian kinerja, TKM mengalami penurunan juga 33.33% yaitu dari capaian sebesar 100,00% pada tahun 2024 menjadi 66,67% pada Tahun 2025.

Jika Jika dibandingkan dengan target

tahun sebelumnya, capaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca pada periode 2023–2025 menunjukkan belum sepenuhnya konsisten dengan yang direncanakan. Target tahun 2023 sampai dengan 2025 berada pada kategori sedang, dan realisasi tahun 2023–2024 telah sesuai dengan target yaitu berada pada kategori sedang. Namun pada tahun 2025 capaian mengalami penurunan menjadi kategori **Rendah, yang antara lain disebabkan oleh penerapan instrumen dan metodologi pengukuran baru sesuai ketentuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sehingga hasil tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan metode sebelumnya. Dengan demikian, selama kurun waktu 2023 hingga 2025 terlihat adanya kecenderungan penurunan secara angka pada tahun terakhir, namun perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh penyesuaian sistem pengukuran yang lebih komprehensif.**

Dari segi perencanaan jangka menengah, TKM Tahun 2025 belum mencapai batas aman yaitu mencapai 66,67% yaitu dari taget dengan kategori **Sedang** dan terealisasi kategori **Rendah**. Bila dibandingkan dengan nasional, TKM Kabupaten Bogor tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena belum ada data yang memuat nilai tersubur yang bisa kami jadikan acuan.

Faktor-faktor yang mendukung pencapai-ian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat antara lain Meningkatnya kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bogor dan Meningkatnya kualitas pemeliharaan Naskah Kuno.

1. Meningkatnya kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bogor ditandai dengan

angka Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan sebesar 1.4% dari target 1.345%. Meningkatnya kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bogor ini didorong oleh pertama Meningkatnya kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bogor yaitu Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan Oleh Masyarakat sebesar 1,0913%. Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk sebesar 0,355%. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk sebesar 0,000562%. Kedua, Terlaksananya kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota sebanyak 15 kegiatan.

Adapun upaya untuk meningkatkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca diantaranya melalui peningkatan kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bogor yang diintervensi program pembinaan perpustakaan yaitu Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan kepada 85 perpustakaan. Pelaksanaan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK sebanyak 1 Perpustakaan Digital. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya sebanyak 1 Perpustakaan. Peningkatan Keterampilan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan sebanyak 100 orang. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan sebanyak 1500 eksemplar. Pelaksanaan Pemilihan Duta Baca sebanyak 3 orang. Pelaksanaan Pengembangan Layanan Perpustakaan

Berbasis Inklusi Sosial sebanyak 3 Perpustakaan. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum sebanyak 1 Perpustakaan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Secara tepat sasaran sebanyak 9 orang. Peningkatan Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi sebanyak 120 Locus.

2. Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara Yang Terlindungi dengan Persentase Naskah Kuno Dan Koleksi Budaya Nusantara Yang Di Kelola Dan Di Lestirikan sebesar 100%. Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara Yang Terlindungi sebesar 100% didukung oleh Meningkatnya kualitas pemeliharaan Naskah Kuno sebanyak 1 Eksemplar.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat melalui Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara Yang Terlindungi yang diintervensi program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno adalah Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno sebanyak 50 orang.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat meliputi 2 (dua) program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Efisiensi anggaran atas capaian rata rata lama sekolah di atas tidak ada. Hal ini disebabkan karena indikator ini tidak mencapai target.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tidak Mencapai Target dan Upaya Perbaikan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2026

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian rata-rata lama seko- lah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan TKM
TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. ***(dokumen informasi tersebut ada dilampiran)***
2. Belum maksimalnya sosialisasi penggunaan perpustakaan digital
Pemanfaatan layanan perpustakaan digital masih belum optimal karena sosialisasi kepada masyarakat dan pemustaka belum dilakukan secara luas dan berkelanjutan. Sebagian pengguna belum memahami keberadaan layanan digital, cara mengakses koleksi elektronik, maupun manfaatnya dalam mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan peningkatan literasi. Kondisi ini menyebabkan fasilitas digital yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga perlu dilakukan upaya promosi, edukasi, dan pendampingan penggunaan secara lebih intensif.
3. Kurangnya sarana dan prasarana di perpustakaan
Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas, baik dari segi fasilitas fisik maupun pendukung layanan berbasis teknologi. Beberapa perpustakaan belum memiliki ruang baca yang representatif, perangkat komputer yang memadai, serta akses internet yang stabil. Keterbatasan ini berdampak pada kenyamanan pengunjung dan belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi serta kegiatan literasi, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Kurangnya jumlah koleksi buku di perpustakaan, baik digital maupun konvensional
Jumlah dan ragam koleksi bahan pustaka yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Koleksi yang ada belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan minat baca pengguna, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber referensi dan pusat pembelajaran, sehingga diperlukan penambahan dan pengembangan koleksi yang relevan dan mutakhir.

Adapun beberapa upaya perbaikan Perbaikan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi secara berkelanjutan

Upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi, baik dari sisi layanan, data koleksi, keanggotaan, maupun akses digital. Sistem yang terpadu akan memudahkan masyarakat dalam mencari bahan bacaan, meminjam koleksi, serta mengakses layanan perpustakaan secara cepat dan efisien. Integrasi ini juga mendukung peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi sehingga perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Memperluas kerja sama dan kolaborasi dengan stakeholder pemerintah dan swasta

Peningkatan minat baca tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi memerlukan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu diperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, satuan pendidikan, komunitas literasi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat dalam penyediaan bahan bacaan, penyelenggaraan kegiatan literasi, dan dukungan sarana prasarana. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan serta menumbuhkan budaya membaca melalui program bersama yang berkelanjutan.

3. Penambahan koleksi buku, baik digital maupun konvensional

Ketersediaan koleksi yang beragam, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kegemaran membaca. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penambahan koleksi secara terencana, mencakup buku cetak, e-book, serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan minat pembaca. Koleksi yang mutakhir dan variatif akan meningkatkan daya tarik perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan rekreasi edukatif bagi masyarakat.

4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan

Sumber daya manusia pengelola perpustakaan perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu memberikan layanan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pembinaan dan pelatihan, pustakawan dan tenaga pengelola diharapkan mampu mengelola koleksi secara efektif, memanfaatkan sistem digital, serta menyelenggarakan kegiatan literasi yang kreatif. SDM yang berkualitas akan berperan sebagai penggerak utama dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat.

5. Melakukan inovasi program literasi untuk mendorong budaya membaca di masyarakat

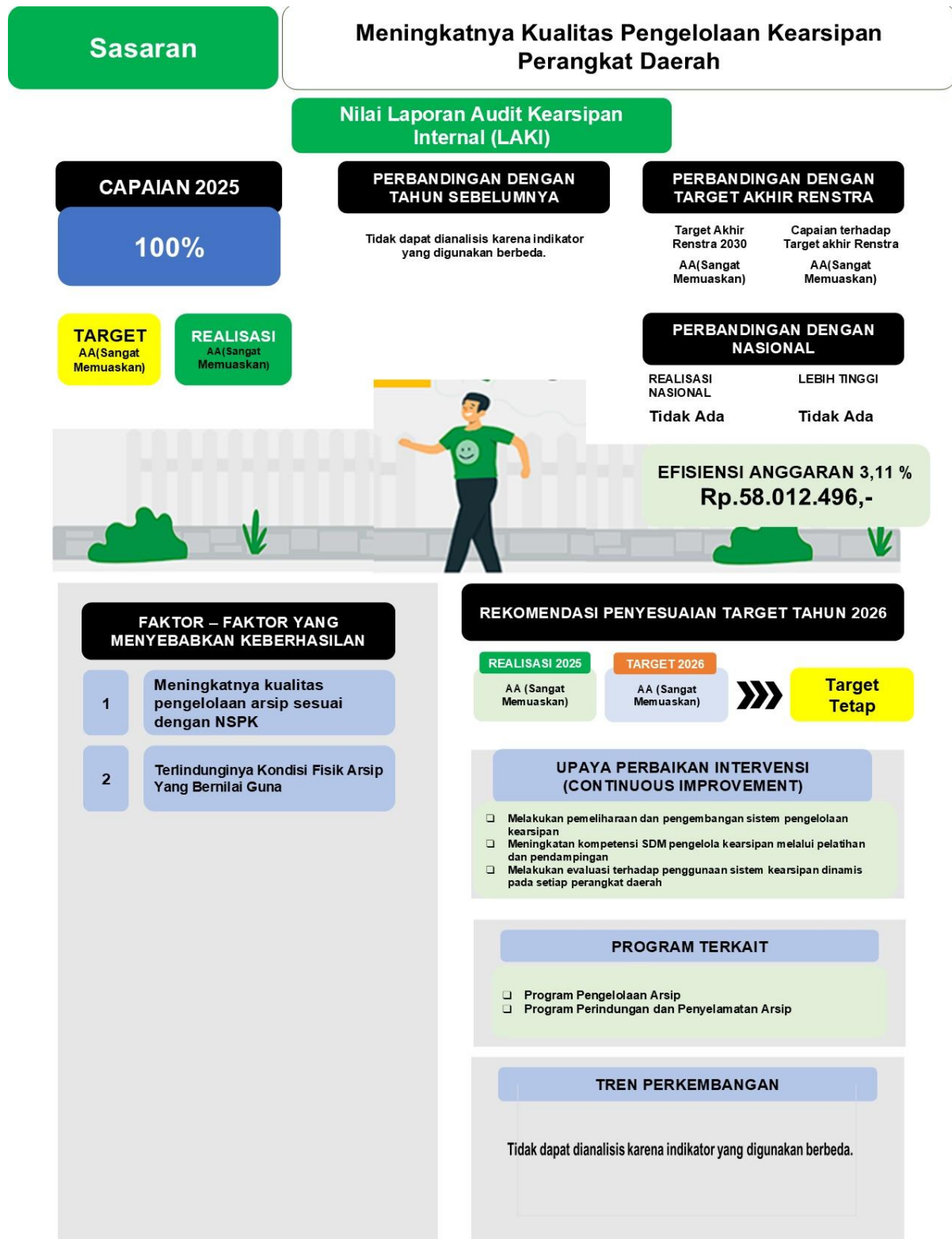
Untuk meningkatkan daya tarik membaca, diperlukan berbagai inovasi kegiatan literasi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pojok baca tematik, layanan perpustakaan keliling, kelas literasi, lomba membaca, serta

pemanfaatan media digital dan sosial. Inovasi ini bertujuan menjadikan kegiatan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang kreatif dan partisipatif, diharapkan kegemaran membaca masyarakat pada Tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan.



Gambar 3.2 Mind Map Interaktif SPKM2

2. Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)



Gambar 3.3 Layout Nilai Hasil Audit Kearsipan Internal (LAKI)

Kualitas Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Bogor yang sangat baik juga bisa dilihat dari Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI). Capaian kinerja Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) telah mencapai target dengan capaian Kategori AA (Sangat Memuaskan) dari target dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan). Realisasi Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan) artinya rata-rata Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah sangat baik pengelolaannya.



Gambar 3.4 Pemberian Penghargaan Nilai LAKI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian **Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)** tidak dapat dianalisis secara tren karena adanya perubahan indikator yang digunakan dalam Sasaran Strategis. Perubahan tersebut menyebabkan data tahun berjalan tidak bersifat *comparable* dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat disajikan analisis kenaikan atau penurunan kinerja secara kuantitatif.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, **Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)**. Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu sudah mencapai 100,00% dari target akhir Renstra dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** terealisasi dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** juga. Pada tingkat nasional belum tersedia indikator pembandingan atau standar nasional yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengukur posisi capaian daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja LAKI pada tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan kriteria penilaian sesuai pedoman terbaru, dengan hasil capaian berada pada kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian **Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)**, antara lain Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Arsip sesuai dengan NSPK Kabupaten Bogor dan Terlindunginya Kondisi Fisik Arsip Yang Bernilai Guna yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip sesuai dengan NSPK Kabupaten Bogor dengan Capaian Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban sebesar 97,58 % dari target 96,95 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,70%. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip sesuai dengan NSPK ini didorong oleh pertama Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis pada PD/BLUD yang sesuai NSPK yang terdiri dari Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 100%, Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah dan BLUD yang pengelolaan kearsipannya sudah baik sesuai dengan NSPK sebesar 86,84%. Kedua, Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip statis pada PD/BLUD yang sesuai NSPK sebesar 100%. Ketiga, Meningkatnya pengelolaan arsip berbasis sistem informasi kearsipan dan Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan kearsipan yang sesuai NSPK yang terdiri dari Persentase jumlah arsip yang dimasukkan/entry dalam SIKN melalui JIKN sebesar 90,33% dan Jumlah SDM yang sudah dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK sebanyak 500 orang.

Upaya untuk meningkatkan Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Arsip yaitu, Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Sebanyak 2200 berkas.

Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota sebanyak 2 laporan. Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota sebanyak 60 Lembaga. Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota sebanyak 10 instansi. Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis sebanyak 1100 arsip. Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN sebanyak 553 pengguna dan Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 7 laporan.

2. Terlindunginya Kondisi Fisik Arsip Yang Bernilai Guna dengan Capaian Indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 100%. Terlindunginya Kondisi Fisik Arsip Yang Bernilai Guna ini didorong oleh Pertama, Terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kearsipan sebesar 100%. Kedua Terlindunginya dan terselamatkannya arsip akibat bencana sebesar 100%. Ketiga, Terautentifikasinya arsip Statis dan arsip hasil Alih Media sesuai NSPK Sebesar 100% dan Tersedianya Informasi Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) yang diintervensi oleh Program Peleindungan dan Penyelamatan Arsip yaitu, Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun sebanyak 1100 Arsip. Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1000 arsip dan Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 2000 arsip.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Arsip, dan Program Program Peleindungan Dan Penyelamatan Arsip. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung keberhasilan tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 3.11% atau setara dengan Rp 58.012.496,00. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 1.866.218.146,00. dan terealisasi sebesar Rp 1.808.205.650,00.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Desk ASKI

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja untuk tujuan strategis Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditetapkan dengan target sebesar 92,5%. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh realisasi sebesar 77,94% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 84,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Rencana Kinerja Tahun 2025

Realisasi Rencana Kinerja Tahun 2025						
No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan Target	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
I	Tujuan Strategis					
1	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	92,5	77,94	84,26	$TC = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$ (Realisasi Capaian Indikator Tujuan R = $(\text{Realisasi IPLM} + \text{Realisasi NHP}) / 2$ atau dengan rumus hitung R = $(39.22+116.67)/2 = 77.94$) memperoleh hasil Tingkat Capaian rata-rata sebesar 84.26 %

Penjelasan Capaian IPLM

Capaian IPLM tahun 2025 menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan metodologi ini berdampak pada ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

Pengukuran IPLM saat ini:

- Lebih menitikberatkan pada dimensi kinerja (70%) dibandingkan dimensi kepatuhan/fisik (30%);
- Menggunakan pendekatan evaluasi yang lebih substantif terhadap dampak layanan perpustakaan dan pembangunan literasi, bukan semata pada pemenuhan administratif;
- Didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), berbeda dengan metode sebelumnya yang berbasis kewilayahan agregat.

Dengan perubahan tersebut, nilai IPLM tahun ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya, karena merupakan hasil pengukuran dengan perspektif baru yang lebih menekankan kualitas kinerja nyata. Nilai yang dihasilkan mencerminkan kondisi faktual di lapangan berdasarkan data yang telah diverifikasi, sehingga berfungsi sebagai pemetaan untuk perumusan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Keterangan Capaian NHP Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh nilai 93,97 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Dalam klaster kabupaten/kota secara nasional, capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bogor pada peringkat ke-8, yang menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan telah dilaksanakan secara sangat baik, khususnya dalam aspek:

- kepatuhan terhadap regulasi kearsipan,
- pengelolaan arsip dinamis dan statis,
- penyelenggaraan sistem kearsipan,
- serta pengawasan internal yang konsisten.

Capaian ini menjadi faktor penguangkit utama dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah secara keseluruhan.

Kesimpulan

Secara agregat, kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian IPLM dipengaruhi oleh transformasi sistem pengukuran nasional yang lebih menekankan kualitas dan dampak kinerja, sedangkan capaian NHP menunjukkan performa tata kelola kearsipan Kabupaten Bogor yang berada pada kategori sangat memuaskan dan kompetitif di tingkat nasional.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kedua sasaran, terdapat dua indikator utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Indikator utama untuk sasaran strategis urusan kearsipan sudah mencapai target namun untuk indikator utama sasaran strategis urusan perpustakaan belum mencapai target. Hal ini menjadi evaluasi dalam perencanaan berikutnya.

Keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bogor didukung oleh pelaksanaan digitalisasi arsip. Hal ini ditandai dengan hasil pengawan kearsipan (NHP) pada tahun 2025 mendapatkan kategori “AA” atau Sangat Memuaskan Peringkat ke 8 (delapan) Tingkat Nasional Clusteer Kab/Kota dan Peringkat ke 1 (satu) dengan Nilai 95.21 kategori “AA” Sangat Memuaskan berdasarkan hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 se-Jawa Barat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain :

- a) Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis serta pendampingan pengelolaan arsip dan optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pengelola kearsipan dinamis aktif terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
- b) Melaksanakan digitalisasi arsip dinamis dan statis melalui SIKN dan JIKN
- c) Melaksanakan alih media arsip/digitalisasi arsip Pemerintahan Desa dan Lembaga Pendidikan.
- d) Melaksanakan monitoring/pengawasan dan evaluasi pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah/Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Lembaga Pendidikan.
- e) Penetapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kearsipan
- f) Penetapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Bogor
- g) Penetapan Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- h) Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

4.1 Saran

Adapun saran dan rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan promosi dan sosialisasi terkait layanan perpustakaan dan kearsipan sehingga dapat membantu tercapainya indikator sasaran strategis di tahun mendatang;
- b) Menciptakan dan mengembangkan inovasi seperti layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan baik;
- c) Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat agar pencapaian sasaran strategis menjadi lebih optimal;
- d) Pemenuhan kebutuhan SDM pengelola perpustakaan dan pengelola kearsipan baik dalam peningkatan kualitas maupun kuantitasnya;
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan yang berbasis teknologi informasi;
- f) Optimalisasi layanan dan akses perpustakaan daring maupun luring;
- g) Melaksanakan kegiatan melibatkan masyarakat sebagai pusat layanan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti pelatihan keterampilan gratis;
- h) Peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan dalam rangka meningkatkan kompetensi pustakawan agar lebih aktif dalam mempromosikan perpustakaan;
- i) Optimalisasi pengelolaan data kinerja layanan perpustakaan yaitu kegiatan-kegiatan literasi, jumlah pengunjung, dan pemanfaatan koleksi secara akurat untuk input data;
- j) Merumuskan Program Literasi Inovatif dengan menyelenggarakan kegiatan kreatif seperti lomba, pameran buku, konser literasi, dan diskusi buku;
- k) Pencanaan gerakan membaca rutin khususnya pelajar/siswa 15 menit sebelum beraktivitas, atau memfasilitasi kelompok baca (komunitas). Serta menggalakkan kegiatan membaca di keluarga dan menyediakan pojok baca yang menarik;
- l) Penyediaan koleksi buku yang relevan dengan minat baca masyarakat, termasuk e-book.

LAMPIRAN

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. SK IKU DAP Tahun 2025-2026
3. Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN IRAWAN, S.E., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA,

IWAN IRAWAN, S.E., M.Si.
NIP. 197103061998031006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	92.5
2	Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Kategori	Sedang
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	AA(Sangat Memuaskan)

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,794,969,511	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,725,051,431	APBD
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	141,166,715	APBD
4	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	821,409,610	APBD
5	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10,360,000	APBD


 BUPATI BOGOR,

 RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
 KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
 DAERAH,


 IWAN JRAWAN, S.E., M.Si.
 NIP. 197103061998031006



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Bersih Komplek Pemda Cibinong – 16914
Telp. (021) 87901363, 8754781. Fax (021) 87901363
Laman: <http://dapd.bogorkab.go.id>, Pos-el : dap@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 000.7.2.6/1041.A-SEKRET

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor;
 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

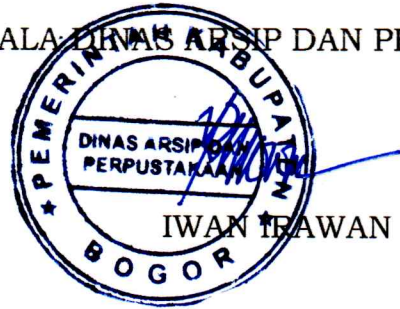
KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja - kinerja pejabat administrator sesuai dengan penjenjangan kinerja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten bogor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN
2025-2029
NOMOR : 000.7.2.6/1041.A-SEKRET
TANGGAL : 15 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan dan tugas pembantuan.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU					FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029			
1	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Budaya Literasi		Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	92.5	94.5	96.5	98.0	98.5	Tingkat capaian kinerja rata-rata NKPA (Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip) + Tingkat Capaian kinerja Rata-rata Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat / 2	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Hasil Kajian PERPUSTAKAAN Nasional dan Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip dari ANRI
2		Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Ke gemaran Membaca Masyarakat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Nilai tingkat ke gemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian ke gemaran membaca masyarakat	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Hasil Kajian PERPUSTAKAAN Nasional
3		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	AA (Sangat Memuaskan)	Hasil penilaian audit penguasaan internal dari Dispusipda Provinsi Jawa Barat	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026 Jakarta, 20 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lamp. : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025

Yth. : 1. **Gubernur**
2. **Bupati/Walikota**
di Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 yang merupakan bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah urusan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran IPLM dan TKM dari masa sanggah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hasil pengukuran, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan IPLM dan TKM

IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

2. Penegasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Kewenangan

Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin

keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

3. Integritas Pengukuran

Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Hasil kajian ini merupakan potret awal dari kondisi literasi di setiap daerah yang sekiranya dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan, program, anggaran, dan regulasi yang berpihak pada pembangunan urusan perpustakaan dan literasi di daerah.

Koordinasi lebih lanjut, staf Bapak/Ibu dapat menghubungi Saudara Irhamni di nomor kontak 0888-7707-741.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan



ADIN BONDAR

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.406	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
27	SULAWESI SELATAN	0.517	0.483	0.472	0.531	0.5	0.501	47.74
28	SULAWESI TENGAH	0.255	0.341	0.333	0.269	0.298	0.301	30.04
29	SULAWESI TENGGARA	0.335	0.267	0.259	0.336	0.301	0.298	29.24
30	SULAWESI UTARA	0.374	0.219	0.33	0.494	0.297	0.412	22.18
31	SUMATERA BARAT	0.419	0.424	0.395	0.483	0.421	0.439	43.36
32	SUMATERA SELATAN	0.537	0.409	0.382	0.495	0.473	0.439	37.81
33	SUMATERA UTARA	0.481	0.411	0.393	0.427	0.446	0.41	40.54

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI AKHIR IPLM KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	KAB. ACEH BARAT	0.03	0.45	0.063	0.198	0.24	0.131	7.6
2	KAB. ACEH BARAT DAYA	0.147	0.178	0.127	0.198	0.162	0.163	5.45
3	KAB. ACEH BESAR	0.144	0.214	0.141	0.266	0.18	0.203	4.94
4	KAB. ACEH JAYA	0.296	0.202	0.322	0.383	0.249	0.353	11.96
5	KAB. ACEH SELATAN	0.133	0.164	0.115	0.229	0.148	0.172	8.24
6	KAB. ACEH SINGKIL	0.194	0.322	0.177	0.329	0.258	0.253	6.49
7	KAB. ACEH TAMIANG	0.069	0.09	0.049	0.086	0.08	0.068	4.15
8	KAB. ACEH TENGAH	0.163	0.218	0.122	0.234	0.191	0.178	7.33
9	KAB. ACEH TENGGARA	0.178	0.189	0.254	0.346	0.184	0.3	2.03
10	KAB. ACEH TIMUR	0.111	0.201	0.171	0.29	0.156	0.231	2.31
11	KAB. ACEH UTARA	0.245	0.261	0.181	0.276	0.253	0.228	3.06
12	KAB. ADM. KEP. SERIBU	0.093	0.022	0	0	0.058	0	0.49
13	KAB. AGAM	0.205	0.202	0.238	0.413	0.204	0.326	21.07
14	KAB. ALOR	0.265	0.277	0.246	0.287	0.271	0.267	0.72
15	KAB. ASAHAN	0.037	0.084	0.088	0.085	0.06	0.087	7.89
16	KAB. BADUNG	0.177	0.177	0.161	0.242	0.177	0.202	19.43
17	KAB. BALANGAN	0.137	0.169	0.122	0.208	0.153	0.165	10.72
18	KAB. BANDUNG	0.32	0.299	0.307	0.374	0.309	0.341	12.54
19	KAB. BANDUNG BARAT	0.246	0.293	0.328	0.431	0.269	0.38	17.51
20	KAB. BANGGAI	0.082	0.18	0.127	0.206	0.131	0.167	1.83
21	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0.135	0.197	0.151	0.271	0.166	0.211	19.77
22	KAB. BANGGAI LAUT	0.04	0.069	0.042	0.078	0.055	0.06	4.34
23	KAB. BANGKA	0.068	0.128	0.113	0.144	0.098	0.129	11.96
24	KAB. BANGKA BARAT	0.233	0.231	0.243	0.286	0.232	0.265	25.5
25	KAB. BANGKALAN	0.16	0.277	0.153	0.275	0.218	0.214	2.99
26	KAB. BANGKA SELATAN	0.115	0.154	0.154	0.218	0.134	0.186	15.92
27	KAB. BANGKA TENGAH	0.136	0.103	0.109	0.124	0.12	0.117	11.77
28	KAB. BANJAR	0.229	0.164	0.141	0.265	0.196	0.203	8.95
29	KAB. BANJARNEGARA	0.178	0.105	0.112	0.134	0.141	0.122	11.49
30	KAB. BANTAENG	0.302	0.491	0.254	0.346	0.397	0.3	15.48
31	KAB. BANTUL	0.13	0.185	0.095	0.111	0.158	0.103	8.41
32	KAB. BANYUASIN	0.105	0.107	0.063	0.117	0.106	0.09	6.62
33	KAB. BANYUMAS	0.237	0.327	0.275	0.217	0.282	0.246	12.03
34	KAB. BANYUWANGI	0.117	0.15	0.36	0.397	0.133	0.379	30.52
35	KAB. BARITO KUALA	0.007	0.048	0.004	0.005	0.027	0.004	1.12
36	KAB. BARITO TIMUR	0.106	0.17	0.11	0.189	0.138	0.15	4.75
37	KAB. BARITO UTARA	0.086	0.145	0.046	0.087	0.115	0.066	2.75
38	KAB. BARRU	0.067	0.167	0.156	0.166	0.117	0.161	13.73
39	KAB. BATANG	0.135	0.153	0.211	0.236	0.144	0.224	19.96
40	KAB. BATANGHARI	0.142	0.264	0.113	0.243	0.203	0.178	4.75
41	KAB. BATU BARA	0.14	0.157	0.149	0.207	0.148	0.178	9.89
42	KAB. BEKASI	0.174	0.301	0.328	0.299	0.238	0.313	29.05
43	KAB. BELITUNG	0.158	0.245	0.148	0.249	0.201	0.198	19.78
44	KAB. BELITUNG TIMUR	0.142	0.167	0.19	0.286	0.155	0.238	21.3
45	KAB. BELU	0.117	0.132	0.126	0.181	0.124	0.154	8.61
46	KAB. BENER MERIAH	0.265	0.429	0.254	0.254	0.347	0.254	4.18
47	KAB. BENGKALIS	0.099	0.092	0.084	0.162	0.096	0.123	5.3
48	KAB. BENGKAYANG	0.186	0.272	0.225	0.409	0.229	0.317	29.06
49	KAB. BENGKULU SELATAN	0.155	0.195	0.121	0.178	0.175	0.15	7.79
50	KAB. BENGKULU TENGAH	0.146	0.337	0.185	0.257	0.241	0.221	3.68

51	KAB. BENGKULU UTARA	0.126	0.199	0.109	0.206	0.163	0.158	9.92
52	KAB. BERAU	0.193	0.118	0.136	0.204	0.156	0.17	9.39
53	KAB. BIMA	0.178	0.24	0.173	0.27	0.209	0.221	1.39
54	KAB. BINTAN	0.199	0.204	0.166	0.203	0.201	0.185	6.1
55	KAB. BIREUEN	0.125	0.212	0.142	0.33	0.168	0.236	10.59
56	KAB. BLITAR	0.103	0.201	0.209	0.262	0.152	0.235	21.05
57	KAB. BLORA	0.114	0.19	0.209	0.273	0.152	0.241	21.45
58	KAB. BOALEMO	0.319	0.266	0.32	0.368	0.293	0.344	1.46
59	KAB. BOGOR	0.564	0.589	0.542	0.714	0.577	0.628	9.5
60	KAB. BOJONEGORO	0.184	0.26	0.114	0.283	0.222	0.199	18.11
61	KAB. BOLAANG MONGONDOW	0.291	0.214	0.245	0.206	0.253	0.225	4.38
62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0.069	0.022	0.072	0.186	0.045	0.128	0.34
63	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0.142	0.198	0.156	0.244	0.17	0.2	3.58
64	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	0.144	0.129	0.074	0.1	0.137	0.087	1.99
65	KAB. BOMBANA	0.083	0.158	0.215	0.475	0.121	0.345	23.4
66	KAB. BONDOWOSO	0.076	0.074	0.071	0.092	0.075	0.081	6.22
67	KAB. BONE	0.211	0.277	0.265	0.343	0.244	0.304	17.25
68	KAB. BONE BOLANGO	0.1	0.168	0.127	0.254	0.134	0.19	17.12
69	KAB. BOVEN DIGOEL	0.055	0.106	0.018	0.033	0.08	0.025	0.73
70	KAB. BOYOLALI	0.272	0.164	0.244	0.243	0.218	0.244	20.57
71	KAB. BREBES	0.11	0.243	0.115	0.12	0.177	0.118	13.57
72	KAB. BULELENG	0.202	0.172	0.218	0.314	0.187	0.266	2.53
73	KAB. BULUKUMBA	0.097	0.18	0.119	0.193	0.139	0.156	15.09
74	KAB. BULUNGAN	0.094	0.117	0.143	0.225	0.105	0.184	3.84
75	KAB. BUNGO	0.146	0.232	0.23	0.277	0.189	0.254	0.47
76	KAB. BUOL	0.112	0.175	0.11	0.18	0.144	0.145	14.48
77	KAB. BURU	0.078	0.129	0.098	0.157	0.104	0.128	6.02
78	KAB. BUTON	0.16	0.212	0.183	0.293	0.186	0.238	3.97
79	KAB. BUTON SELATAN	0.179	0.259	0.13	0.207	0.219	0.169	6.55
80	KAB. BUTON TENGAH	0.141	0.25	0.161	0.218	0.195	0.189	2.79
81	KAB. CIAMIS	0.108	0.115	0.169	0.261	0.111	0.216	18.42
82	KAB. CIANJUR	0.096	0.11	0.126	0.172	0.103	0.149	11.31
83	KAB. CILACAP	0.211	0.255	0.168	0.326	0.233	0.247	20.81
84	KAB. CIREBON	0.07	0.101	0.129	0.147	0.086	0.138	4.28
85	KAB. DELI SERDANG	0.183	0.162	0.098	0.109	0.172	0.104	8.91
86	KAB. DEMAK	0.07	0.05	0.112	0.106	0.06	0.109	9.42
87	KAB. DHARMASRAYA	0.129	0.229	0.217	0.325	0.179	0.271	19.04
88	KAB. DOMPU	0.306	0.173	0.21	0.28	0.239	0.245	0.58
89	KAB. DONGGALA	0.138	0.137	0.121	0.185	0.137	0.153	5.82
90	KAB. EMPAT LAWANG	0.108	0.235	0.137	0.285	0.171	0.211	17.77
91	KAB. ENREKANG	0.135	0.29	0.279	0.401	0.213	0.34	30.2
92	KAB. FAKFAK	0.114	0.241	0.155	0.182	0.178	0.169	1.34
93	KAB. FLORES TIMUR	0.044	0.073	0.073	0.052	0.059	0.063	0.5
94	KAB. GARUT	0.036	0.047	0.031	0.051	0.042	0.041	4.12
95	KAB. GAYO LUES	0.044	0.068	0.08	0.154	0.056	0.117	9.88
96	KAB. GIANYAR	0.122	0.12	0.122	0.177	0.121	0.149	6.04
97	KAB. GORONTALO	0.171	0.16	0.178	0.229	0.165	0.203	1.37
98	KAB. GORONTALO UTARA	0.046	0.166	0.11	0.232	0.105	0.171	0.74
99	KAB. GOWA	0.18	0.248	0.167	0.268	0.214	0.217	7.75
100	KAB. GRESIK	0.057	0.055	0.053	0.083	0.056	0.068	6.42
101	KAB. GROBOGAN	0.239	0.33	0.294	0.523	0.285	0.408	37.12
102	KAB. GUNUNGKIDUL	0.129	0.153	0.142	0.214	0.141	0.178	16.67
103	KAB. GUNUNG MAS	0.092	0.105	0.053	0.026	0.098	0.04	4.33

104	KAB. HALMAHERA BARAT	0.224	0.171	0.184	0.178	0.198	0.181	1.35
105	KAB. HALMAHERA SELATAN	0.119	0.114	0.082	0.184	0.117	0.133	2.2
106	KAB. HALMAHERA TENGAH	0.14	0.354	0.218	0.402	0.247	0.31	2.73
107	KAB. HALMAHERA UTARA	0.127	0.128	0.104	0.147	0.127	0.125	1.68
108	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0.223	0.308	0.229	0.349	0.266	0.289	27.36
109	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0.101	0.178	0.092	0.21	0.14	0.151	5.84
110	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0.099	0.119	0.143	0.148	0.109	0.146	13.46
111	KAB. INDRAGIRI HILIR	0.155	0.331	0.217	0.322	0.243	0.269	1.87
112	KAB. INDRAGIRI HULU	0.095	0.07	0.025	0.034	0.083	0.03	4.57
113	KAB. INDRAMAYU	0.101	0.078	0.083	0.129	0.089	0.106	2.88
114	KAB. JEMBER	0.172	0.213	0.212	0.264	0.192	0.238	5.59
115	KAB. JENEPONTO	0.226	0.272	0.306	0.297	0.249	0.302	27.48
116	KAB. JEPARA	0.188	0.207	0.187	0.243	0.198	0.215	10.35
117	KAB. JOMBANG	0.079	0.11	0.292	0.369	0.094	0.33	23.58
118	KAB. KAIMANA	0.055	0.016	0.081	0.245	0.036	0.163	4.59
119	KAB. KAMPAR	0.141	0.143	0.243	0.305	0.142	0.274	13.38
120	KAB. KAPUAS	0.112	0.206	0.128	0.253	0.159	0.19	1.17
121	KAB. KAPUAS HULU	0.044	0.1	0.24	0.32	0.072	0.28	21.77
122	KAB. KARANGANYAR	0.114	0.116	0.087	0.141	0.115	0.114	11.43
123	KAB. KARANGASEM	0.082	0.09	0.073	0.145	0.086	0.11	5.72
124	KAB. KARAWANG	0.177	0.187	0.192	0.243	0.181	0.218	4.22
125	KAB. KARIMUN	0.079	0.111	0.075	0.132	0.095	0.104	10.1
126	KAB. KARO	0.045	0.029	0.026	0.038	0.037	0.031	3.32
127	KAB. KAUR	0.183	0.281	0.133	0.187	0.232	0.16	0.25
128	KAB. KAYONG UTARA	0.057	0.119	0.091	0.102	0.088	0.097	5.19
129	KAB. KEBUMEN	0.429	0.25	0.508	0.354	0.34	0.431	40.36
130	KAB. KEDIRI	0.092	0.136	0.103	0.148	0.114	0.126	4.99
131	KAB. KENDAL	0.158	0.169	0.182	0.275	0.164	0.228	20.1
132	KAB. KEPAHANG	0.28	0.325	0.231	0.358	0.302	0.295	2.51
133	KAB. KEP. ANAMBAS	0.103	0.167	0.213	0.301	0.135	0.257	14.24
134	KAB. KEPULAUAN ARU	0.133	0.209	0.153	0.2	0.171	0.176	17.46
135	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0.01	0.022	0.068	0.13	0.016	0.099	7.4
136	KAB. KEPULAUAN MERANTI	0.308	0.316	0.227	0.345	0.312	0.286	29.38
137	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	0.068	0.157	0.091	0.146	0.113	0.119	11.69
138	KAB. KEP. SELAYAR	0.041	0.163	0.037	0.054	0.102	0.046	5.72
139	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	0.064	0.074	0.101	0.112	0.069	0.106	9.52
140	KAB. KEPULAUAN SULA	0.068	0.139	0.101	0.154	0.103	0.127	12.01
141	KAB. KEPULAUAN TALAUD	0.139	0.174	0.136	0.232	0.156	0.184	17.58
142	KAB. KERINCI	0.165	0.177	0.271	0.243	0.171	0.257	1.47
143	KAB. KETAPANG	0.083	0.08	0.095	0.137	0.081	0.116	10.55
144	KAB. KLATEN	0.086	0.147	0.115	0.134	0.117	0.125	12.24
145	KAB. KLUNGKUNG	0.077	0.145	0.151	0.23	0.111	0.19	16.69
146	KAB. KOLAKA	0.172	0.252	0.165	0.276	0.212	0.221	3.49
147	KAB. KOLAKA TIMUR	0.166	0.225	0.229	0.275	0.196	0.252	4.05
148	KAB. KOLAKA UTARA	0.277	0.42	0.229	0.26	0.349	0.245	7.14
149	KAB. KONawe	0.05	0.05	0.045	0.074	0.05	0.06	5.69
150	KAB. KONawe KEPULAUAN	0.299	0.146	0.265	0.303	0.222	0.284	26.55
151	KAB. KONawe SELATAN	0.149	0.23	0.147	0.227	0.19	0.187	3.44
152	KAB. KONawe UTARA	0.065	0.1	0.06	0.032	0.082	0.046	0.34
153	KAB. KOTABARU	0.124	0.244	0.152	0.351	0.184	0.252	10.98
154	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	0.151	0.225	0.071	0.194	0.188	0.132	14.9
155	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0.094	0.144	0.088	0.156	0.119	0.122	3.9
156	KAB. KUANTAN SINGINGI	0.214	0.268	0.306	0.375	0.241	0.34	0.7

157	KAB. KUBU RAYA	0.099	0.164	0.152	0.242	0.132	0.197	3.76
158	KAB. KUDUS	0.154	0.327	0.197	0.301	0.241	0.249	24.65
159	KAB. KULON PROGO	0.233	0.182	0.189	0.289	0.208	0.239	20.47
160	KAB. KUNINGAN	0.177	0.199	0.194	0.249	0.188	0.222	2.99
161	KAB. KUPANG	0.087	0.085	0.097	0.096	0.086	0.097	0.15
162	KAB. KUTAI BARAT	0.125	0.185	0.09	0.141	0.155	0.115	4.04
163	KAB. KUTAI KARTANEGARA	0.283	0.28	0.262	0.267	0.281	0.264	12.81
164	KAB. KUTAI TIMUR	0.152	0.152	0.153	0.224	0.152	0.188	10.05
165	KAB. LABUHANBATU	0.127	0.179	0.107	0.266	0.153	0.187	2.73
166	KAB. LABUHANBATU SELATAN	0.159	0.164	0.127	0.222	0.162	0.174	13.85
167	KAB. LABUHANBATU UTARA	0.038	0.12	0.062	0.126	0.079	0.094	0.81
168	KAB. LAHAT	0.073	0.163	0.074	0.144	0.118	0.109	6.3
169	KAB. LAMANDAU	0.116	0.112	0.093	0.153	0.114	0.123	9.44
170	KAB. LAMONGAN	0.121	0.247	0.179	0.262	0.184	0.22	18.9
171	KAB. LAMPUNG BARAT	0.296	0.496	0.377	0.528	0.396	0.452	15.25
172	KAB. LAMPUNG SELATAN	0.039	0.03	0.042	0.073	0.034	0.058	0.13
173	KAB. LAMPUNG TENGAH	0.027	0.022	0.07	0.063	0.024	0.067	0.05
174	KAB. LAMPUNG TIMUR	0.117	0.173	0.118	0.256	0.145	0.187	12.78
175	KAB. LAMPUNG UTARA	0.098	0.111	0.121	0.103	0.104	0.112	10.98
176	KAB. LANDAK	0.088	0.138	0.043	0.1	0.113	0.072	4.04
177	KAB. LANGKAT	0.138	0.168	0.127	0.22	0.153	0.173	8.9
178	KAB. LEBAK	0.214	0.137	0.199	0.261	0.176	0.23	0.6
179	KAB. LEBONG	0.111	0.184	0.106	0.218	0.147	0.162	6.05
180	KAB. LEMBATA	0.155	0.264	0.167	0.291	0.209	0.229	3.28
181	KAB. LIMA PULUH KOTA	0.184	0.185	0.186	0.264	0.184	0.225	19.87
182	KAB. LINGGA	0.035	0.061	0.124	0.126	0.048	0.126	10.23
183	KAB. LOMBOK BARAT	0.082	0.092	0.113	0.105	0.087	0.109	3.28
184	KAB. LOMBOK TENGAH	0.014	0.024	0.014	0.02	0.019	0.017	1.73
185	KAB. LOMBOK TIMUR	0.223	0.268	0.215	0.274	0.246	0.244	0.81
186	KAB. LOMBOK UTARA	0.036	0.055	0.106	0.088	0.046	0.097	8.15
187	KAB. LUMAJANG	0.091	0.171	0.074	0.127	0.131	0.101	7.29
188	KAB. LUWU	0.068	0.151	0.091	0.165	0.11	0.128	5.53
189	KAB. LUWU TIMUR	0.126	0.126	0.127	0.204	0.126	0.165	15.37
190	KAB. LUWU UTARA	0.157	0.206	0.198	0.324	0.182	0.261	7.01
191	KAB. MADIUN	0.098	0.138	0.096	0.19	0.118	0.143	13.56
192	KAB. MAGELANG	0.193	0.286	0.243	0.222	0.239	0.233	12.31
193	KAB. MAGETAN	0.078	0.042	0.061	0.064	0.06	0.062	6.04
194	KAB. MAJALENGKA	0.102	0.101	0.101	0.149	0.101	0.125	5.78
195	KAB. MAJENE	0.214	0.29	0.199	0.226	0.252	0.213	2.13
196	KAB. MALAKA	0.097	0.05	0.159	0.136	0.073	0.148	0.97
197	KAB. MALANG	0.145	0.154	0.143	0.267	0.149	0.205	5.83
198	KAB. MALINAU	0.143	0.154	0.137	0.193	0.149	0.165	6.34
199	KAB. MALUKU TENGAH	0.142	0.132	0.127	0.16	0.137	0.143	1.45
200	KAB. MALUKU TENGGARA	0.059	0.078	0.074	0.07	0.069	0.072	1.61
201	KAB. MAMUJU	0.181	0.183	0.193	0.283	0.182	0.238	1.23
202	KAB. MANDAILING NATAL	0.028	0.079	0.059	0.107	0.054	0.083	4.75
203	KAB. MANGGARAI	0.143	0.236	0.254	0.313	0.189	0.284	3.47
204	KAB. MANGGARAI BARAT	0.017	0.054	0.016	0.025	0.036	0.02	2.49
205	KAB. MANGGARAI TIMUR	0.03	0.073	0.186	0.217	0.052	0.202	8.65
206	KAB. MANOKWARI	0.397	0.256	0.292	0.425	0.326	0.359	4.36
207	KAB. MAPPI	0.109	0.13	0.11	0.179	0.12	0.144	0.22
208	KAB. MAROS	0.183	0.161	0.231	0.256	0.172	0.243	22.17
209	KAB. MAYBRAT	0.062	0	0.026	0.099	0.031	0.062	0.05

210	KAB. MELAWI	0.104	0.151	0.128	0.215	0.128	0.171	3.75
211	KAB. MEMPAWAH	0.13	0.272	0.123	0.286	0.201	0.204	2.96
212	KAB. MERANGIN	0.09	0.085	0.088	0.13	0.087	0.109	1.94
213	KAB. MERAUKE	0.036	0.074	0.069	0.154	0.055	0.112	0.66
214	KAB. MESUJI	0.115	0.19	0.16	0.242	0.152	0.201	13.76
215	KAB. MIMIKA	0.153	0.352	0.17	0.274	0.253	0.222	3.93
216	KAB. MINAHASA	0.091	0.096	0.085	0.104	0.094	0.094	0.16
217	KAB. MINAHASA SELATAN	0.08	0.101	0.092	0.05	0.09	0.071	0.09
218	KAB. MINAHASA TENGGARA	0.121	0.206	0.222	0.228	0.164	0.225	0.39
219	KAB. MINAHASA UTARA	0.196	0.195	0.18	0.289	0.196	0.235	6.6
220	KAB. MOJOKERTO	0.077	0.064	0.115	0.204	0.071	0.16	13.3
221	KAB. MOROWALI	0.117	0.13	0.084	0.127	0.123	0.106	7.49
222	KAB. MOROWALI UTARA	0.093	0.084	0.08	0.104	0.089	0.092	1.8
223	KAB. MUARA ENIM	0.136	0.154	0.107	0.228	0.145	0.168	9.64
224	KAB. MUARO JAMBI	0.1	0.119	0.077	0.146	0.11	0.111	3.39
225	KAB. MUKO MUKO	0.147	0.133	0.121	0.17	0.14	0.145	0.26
226	KAB. MUNA	0.067	0.138	0.114	0.179	0.103	0.146	4.16
227	KAB. MUNA BARAT	0.073	0.104	0.121	0.13	0.088	0.125	5.84
228	KAB. MURUNG RAYA	0.146	0.305	0.127	0.238	0.226	0.182	0.55
229	KAB. MUSI BANYUASIN	0.153	0.219	0.195	0.268	0.186	0.231	6.03
230	KAB. MUSI RAWAS	0.322	0.43	0.23	0.336	0.376	0.283	6.32
231	KAB. MUSI RAWAS UTARA	0.091	0.254	0.109	0.186	0.172	0.148	14.63
232	KAB. NAGAN RAYA	0.133	0.203	0.106	0.159	0.168	0.132	7.08
233	KAB. NAGEKEO	0.157	0.21	0.148	0.274	0.184	0.211	3.72
234	KAB. NATUNA	0.086	0.109	0.131	0.135	0.097	0.133	10.91
235	KAB. NGADA	0.122	0.3	0.16	0.181	0.211	0.171	2.06
236	KAB. NGANJUK	0.319	0.187	0.365	0.406	0.253	0.385	23.4
237	KAB. NGAWI	0.185	0.197	0.158	0.242	0.191	0.2	10.02
238	KAB. NIAS	0.088	0.134	0.082	0.186	0.111	0.134	1.52
239	KAB. NIAS BARAT	0.295	0.333	0.258	0.246	0.314	0.252	2.65
240	KAB. NIAS SELATAN	0.162	0.116	0.033	0.118	0.139	0.076	0.11
241	KAB. NIAS UTARA	0.109	0.202	0.085	0.117	0.156	0.101	0.15
242	KAB. NUNUKAN	0.104	0.129	0.101	0.167	0.116	0.134	5.31
243	KAB. OGAN ILIR	0.037	0.124	0.05	0.057	0.08	0.054	5.49
244	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0.3	0.413	0.277	0.315	0.356	0.296	30.32
245	KAB. OGAN KOMERING ULU	0.406	0.585	0.375	0.549	0.495	0.462	10.71
246	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	0.147	0.225	0.161	0.288	0.186	0.225	8.76
247	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	0.044	0.132	0.072	0.041	0.088	0.057	5.14
248	KAB. PACITAN	0.108	0.118	0.084	0.144	0.113	0.114	8.01
249	KAB. PADANG LAWAS	0.293	0.335	0.238	0.353	0.314	0.296	1.64
250	KAB. PADANG LAWAS UTARA	0.086	0.164	0.1	0.237	0.125	0.169	1.63
251	KAB. PADANG PARIAMAN	0.103	0.141	0.117	0.212	0.122	0.164	7.79
252	KAB. PAKPAK BHARAT	0.26	0.084	0.105	0.14	0.172	0.123	8.26
253	KAB. PAMEKASAN	0.134	0.235	0.192	0.377	0.184	0.284	4.89
254	KAB. PANDEGLANG	0.179	0.186	0.182	0.247	0.182	0.214	4.87
255	KAB. PANGANDARAN	0.208	0.135	0.2	0.194	0.172	0.197	8.64
256	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.	0.399	0.506	0.52	0.675	0.453	0.597	55.41
257	KAB. PARIGI MOUTONG	0.146	0.15	0.156	0.208	0.148	0.182	2.71
258	KAB. PASAMAN	0.078	0.15	0.11	0.253	0.114	0.181	7.19
259	KAB. PASAMAN BARAT	0.11	0.173	0.108	0.153	0.141	0.131	6.11
260	KAB. PASANGKAYU	0.216	0.284	0.105	0.268	0.25	0.186	3.06
261	KAB. PASER	0.165	0.176	0.147	0.216	0.171	0.181	5.51
262	KAB. PASURUAN	0.151	0.186	0.169	0.332	0.169	0.251	3.18

263	KAB. PATI	0.234	0.274	0.259	0.319	0.254	0.289	11.86
264	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	0	0.045	0.004	0.011	0.023	0.008	0.04
265	KAB. PEKALONGAN	0.225	0.003	0.04	0.025	0.114	0.032	4.71
266	KAB. PELALAWAN	0.158	0.235	0.15	0.254	0.197	0.202	2.96
267	KAB. PEMALANG	0.216	0.236	0.201	0.229	0.226	0.215	14.88
268	KAB. PENAJAM PASER UTARA	0.191	0.177	0.178	0.191	0.184	0.184	18.2
269	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0.086	0.183	0.127	0.14	0.135	0.133	13.37
270	KAB. PESAWARAN	0.031	0.162	0.087	0.097	0.097	0.092	6.37
271	KAB. PESISIR SELATAN	0.197	0.293	0.189	0.259	0.245	0.224	7.06
272	KAB. PIDIE	0.163	0.288	0.203	0.337	0.225	0.27	13.07
273	KAB. PIDIE JAYA	0.225	0.292	0.173	0.397	0.259	0.285	17.62
274	KAB. PINRANG	0.037	0.012	0.123	0.274	0.025	0.198	10.62
275	KAB. POHUWATO	0.118	0.172	0.119	0.231	0.145	0.175	6.85
276	KAB. POLEWALI MANDAR	0.195	0.315	0.229	0.271	0.255	0.25	0.2
277	KAB. PONOROGO	0.156	0.184	0.165	0.244	0.17	0.204	5.89
278	KAB. POSO	0.093	0.114	0.103	0.189	0.104	0.147	6.21
279	KAB. PRINGSEWU	0.086	0.091	0.106	0.15	0.089	0.128	11.13
280	KAB. PROBOLINGGO	0.127	0.083	0.123	0.288	0.105	0.205	15.5
281	KAB. PULANG PISAU	0.048	0.076	0.065	0.07	0.062	0.067	0.54
282	KAB. PULAU MOROTAI	0.201	0.266	0.177	0.28	0.233	0.228	10.74
283	KAB. PULAU TALIABU	0.129	0.161	0.145	0.166	0.145	0.155	10.3
284	KAB. PURBALINGGA	0.157	0.199	0.164	0.298	0.177	0.231	14.07
285	KAB. PURWAKARTA	0.014	0.02	0.018	0.019	0.017	0.019	1.82
286	KAB. PURWOREJO	0.133	0.128	0.116	0.191	0.13	0.153	9.36
287	KAB. REJANG LEBONG	0.166	0.112	0.148	0.211	0.139	0.179	1.95
288	KAB. REMBANG	0.041	0.053	0.04	0.065	0.047	0.053	0.45
289	KAB. ROKAN HILIR	0.136	0.173	0.108	0.216	0.154	0.162	2.8
290	KAB. ROKAN HULU	0.182	0.174	0.144	0.189	0.178	0.167	5.33
291	KAB. ROTE NDAO	0.17	0.137	0.206	0.195	0.154	0.2	9.05
292	KAB. SABU RAIJUA	0.17	0.305	0.205	0.393	0.237	0.299	28.05
293	KAB. SAMBAS	0.047	0.1	0.072	0.103	0.074	0.087	8.34
294	KAB. SAMPANG	0.209	0.229	0.179	0.304	0.219	0.242	2.52
295	KAB. SANGGAU	0.183	0.418	0.565	0.453	0.3	0.509	32.02
296	KAB. SARMI	0.114	0.193	0.094	0.199	0.153	0.146	5.17
297	KAB. SAROLANGUN	0.138	0.128	0.177	0.301	0.133	0.239	20.71
298	KAB. SEKADAU	0.228	0.309	0.211	0.4	0.269	0.305	1.49
299	KAB. SELUMA	0.126	0.179	0.106	0.167	0.152	0.136	7.07
300	KAB. SEMARANG	0.219	0.177	0.215	0.309	0.198	0.262	11.59
301	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	0.179	0.225	0.156	0.289	0.202	0.223	5.78
302	KAB. SERANG	0.211	0.175	0.202	0.292	0.193	0.247	3.52
303	KAB. SERDANG BEDAGAI	0.229	0.195	0.156	0.238	0.212	0.197	1.18
304	KAB. SERUYAN	0.091	0.135	0.134	0.2	0.113	0.167	9.86
305	KAB. SIAK	0.062	0.096	0.086	0.155	0.079	0.121	10.81
306	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0.098	0.157	0.22	0.234	0.128	0.227	19.73
307	KAB. SIDOARJO	0.245	0.272	0.256	0.35	0.259	0.303	10.96
308	KAB. SIGI	0.231	0.11	0.18	0.387	0.171	0.283	22.84
309	KAB. SIJUNJUNG	0.248	0.195	0.2	0.297	0.221	0.248	11.04
310	KAB. SIKKA	0.155	0.135	0.134	0.31	0.145	0.222	1.48
311	KAB. SIMEULUE	0.157	0.133	0.181	0.459	0.145	0.32	0.85
312	KAB. SINJAI	0.076	0.217	0.11	0.156	0.146	0.133	13.7
313	KAB. SINTANG	0.246	0.202	0.146	0.259	0.224	0.203	0.9
314	KAB. SITUBONDO	0.11	0.173	0.118	0.205	0.141	0.162	10.24
315	KAB. SLEMAN	0.182	0.155	0.172	0.251	0.169	0.212	11.14

316	KAB. SOLOK	0.227	0.414	0.352	0.332	0.32	0.342	1.36
317	KAB. SOLOK SELATAN	0.117	0.086	0.127	0.146	0.101	0.137	6.57
318	KAB. SOPPENG	0.058	0.123	0.054	0.163	0.091	0.109	10.34
319	KAB. SORONG	0.329	0.278	0.164	0.291	0.304	0.227	0.88
320	KAB. SRAGEN	0.045	0.069	0.078	0.046	0.057	0.062	6.05
321	KAB. SUBANG	0.107	0.431	0.183	0.292	0.269	0.237	4.81
322	KAB. SUKABUMI	0.049	0.054	0.189	0.229	0.051	0.209	13.66
323	KAB. SUKAMARA	0.126	0.241	0.167	0.262	0.183	0.215	19.17
324	KAB. SUKOHARJO	0.298	0.254	0.287	0.448	0.276	0.368	23.8
325	KAB. SUMBA BARAT	0.123	0.185	0.226	0.331	0.154	0.278	20
326	KAB. SUMBA BARAT DAYA	0.097	0.239	0.09	0.19	0.168	0.14	0.48
327	KAB. SUMBA TENGAH	0.266	0.43	0.272	0.26	0.348	0.266	2.88
328	KAB. SUMBA TIMUR	0.109	0.131	0.129	0.214	0.12	0.171	2.82
329	KAB. SUMBAWA	0.139	0.17	0.154	0.228	0.154	0.191	2.95
330	KAB. SUMBAWA BARAT	0.154	0.227	0.154	0.3	0.191	0.227	13.37
331	KAB. SUMEDANG	0.084	0.117	0.076	0.105	0.1	0.091	8.78
332	KAB. SUMENEP	0.097	0.228	0.244	0.24	0.162	0.242	10.65
333	KAB. SUPIORI	0.039	0.077	0.059	0.159	0.058	0.109	7.94
334	KAB. TABALONG	0.136	0.209	0.229	0.446	0.173	0.338	28.82
335	KAB. TABANAN	0.299	0.333	0.291	0.362	0.316	0.326	0.8
336	KAB. TAKALAR	0.345	0.372	0.279	0.294	0.358	0.287	26.38
337	KAB. TANAH BUMBU	0.05	0.211	0.136	0.235	0.13	0.186	13.92
338	KAB. TANAH DATAR	0.229	0.172	0.255	0.32	0.2	0.288	3.06
339	KAB. TANAH LAUT	0.152	0.16	0.093	0.143	0.156	0.118	4.33
340	KAB. TANA TIDUNG	0.087	0.191	0.103	0.219	0.139	0.161	6.16
341	KAB. TANA TORAJA	0.176	0.389	0.299	0.357	0.283	0.328	1.83
342	KAB. TANGERANG	0.241	0.417	0.289	0.418	0.329	0.354	11.79
343	KAB. TANGGAMUS	0.028	0.077	0.101	0.025	0.053	0.062	5.96
344	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0.254	0.244	0.205	0.363	0.249	0.284	14.19
345	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0.282	0.144	0.2	0.183	0.213	0.192	1.28
346	KAB. TAPANULI SELATAN	0.11	0.14	0.116	0.201	0.125	0.158	6.21
347	KAB. TAPANULI TENGAH	0.112	0.132	0.081	0.136	0.122	0.108	1.28
348	KAB. TAPIN	0.058	0.108	0.081	0.093	0.083	0.087	8.6
349	KAB. TEBO	0.142	0.141	0.187	0.276	0.142	0.232	1.34
350	KAB. TEGAL	0.199	0.25	0.227	0.284	0.225	0.255	6
351	KAB. TELUK BINTUNI	0.09	0.08	0.117	0.06	0.085	0.088	6.58
352	KAB. TELUK WONDAMA	0.162	0.164	0.172	0.313	0.163	0.243	14.83
353	KAB. TEMANGGUNG	0.167	0.259	0.37	0.376	0.213	0.373	24.03
354	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0.103	0.216	0.16	0.216	0.159	0.188	0.34
355	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0.146	0.21	0.171	0.319	0.178	0.245	0.37
356	KAB. TOBA	0.051	0.067	0.181	0.181	0.06	0.181	10.78
357	KAB. TOJO UNA-UNA	0.32	0.178	0.213	0.221	0.249	0.217	8.68
358	KAB. TOLI TOLI	0.21	0.279	0.191	0.299	0.244	0.245	2.22
359	KAB. TRENGGALEK	0.217	0.199	0.206	0.27	0.208	0.238	14.06
360	KAB. TUBAN	0.236	0.185	0.292	0.32	0.211	0.306	12.27
361	KAB. TULANG BAWANG	0.085	0.129	0.075	0.121	0.107	0.098	7.61
362	KAB. TULANG BAWANG BARAT	0.309	0.262	0.291	0.116	0.285	0.204	5.67
363	KAB. TULUNGAGUNG	0.11	0.13	0.175	0.215	0.12	0.195	10.46
364	KAB. WAKATOBI	0.035	0.088	0.085	0.08	0.061	0.082	7.46
365	KAB. WAROPEN	0.032	0.11	0.043	0.145	0.071	0.094	1.48
366	KAB. WAY KANAN	0.389	0.252	0.378	0.544	0.321	0.461	37.15
367	KAB. WONOGIRI	0.086	0.109	0.239	0.333	0.097	0.286	15.83
368	KAB. WONOSOBO	0.122	0.146	0.229	0.286	0.134	0.257	20.41

369	KAB. YAHUKIMO	0.068	0.099	0.068	0.113	0.084	0.09	0.1
370	KOTA AMBON	0.108	0.162	0.095	0.124	0.135	0.11	11.74
371	KOTA BALIKPAPAN	0.303	0.259	0.316	0.396	0.281	0.356	22.83
372	KOTA BANDA ACEH	0.117	0.179	0.176	0.352	0.148	0.264	17.37
373	KOTA BANDAR LAMPUNG	0.089	0.106	0.078	0.186	0.098	0.132	11.11
374	KOTA BANDUNG	0.111	0.137	0.126	0.203	0.124	0.165	15.23
375	KOTA BANJAR	0.113	0.102	0.15	0.225	0.108	0.188	14.65
376	KOTA BANJARBARU	0.139	0.22	0.146	0.247	0.179	0.197	18.49
377	KOTA BANJARMASIN	0.102	0.155	0.104	0.155	0.128	0.13	12.91
378	KOTA BATAM	0.114	0.189	0.142	0.192	0.151	0.167	12.36
379	KOTA BATU	0.417	0.429	0.429	0.647	0.423	0.538	36.57
380	KOTA BEKASI	0.092	0.208	0.087	0.175	0.15	0.131	9.41
381	KOTA BENGKULU	0.242	0.262	0.211	0.373	0.252	0.292	4
382	KOTA BIMA	0.127	0.206	0.157	0.266	0.167	0.212	19.83
383	KOTA BINJAI	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
384	KOTA BITUNG	0.168	0.197	0.146	0.285	0.183	0.215	6.08
385	KOTA BLITAR	0.144	0.155	0.129	0.206	0.15	0.167	15.54
386	KOTA BOGOR	0.208	0.333	0.214	0.274	0.271	0.244	10.02
387	KOTA BONTANG	0.542	0.39	0.466	0.576	0.466	0.521	42.85
388	KOTA BUKITINGGI	0.414	0.471	0.405	0.469	0.442	0.437	20.06
389	KOTA CILEGON	0.328	0.114	0.364	0.268	0.221	0.316	28.75
390	KOTA CIREBON	0.191	0.274	0.208	0.331	0.233	0.269	9.93
391	KOTA DENPASAR	0.124	0.163	0.236	0.318	0.143	0.277	18.69
392	KOTA DEPOK	0.022	0.052	0.012	0.026	0.037	0.019	2.41
393	KOTA DUMAI	0.087	0.229	0.148	0.291	0.158	0.219	18.44
394	KOTA GORONTALO	0.154	0.157	0.138	0.189	0.156	0.163	16.12
395	KOTA GUNUNGSITOLI	0.124	0.143	0.149	0.144	0.133	0.146	5.5
396	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	0.28	0.222	0.378	0.278	0.251	0.328	30.46
397	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	0.161	0.175	0.176	0.255	0.168	0.216	16.23
398	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	0.491	0.447	0.484	0.454	0.469	0.469	7.24
399	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	0.213	0.197	0.212	0.291	0.205	0.251	5.27
400	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	0.284	0.222	0.39	0.273	0.253	0.332	30.81
401	KOTA JAMBI	0.192	0.177	0.18	0.252	0.184	0.216	10.97
402	KOTA JAYAPURA	0.141	0.18	0.204	0.316	0.161	0.26	6.75
403	KOTA KEDIRI	0.128	0.136	0.239	0.241	0.132	0.24	20.75
404	KOTA KENDARI	0.132	0.154	0.13	0.187	0.143	0.159	13.77
405	KOTA KOTAMOBAGU	0.187	0.251	0.151	0.236	0.219	0.194	8.98
406	KOTA KUPANG	0.146	0.146	0.121	0.269	0.146	0.195	8.81
407	KOTA LANGSA	0.088	0.098	0.116	0.188	0.093	0.152	11
408	KOTA LHOKSEUMAWE	0.235	0.181	0.19	0.295	0.208	0.242	16.77
409	KOTA LUBUK LINGGAU	0.113	0.168	0.105	0.216	0.141	0.161	13.64
410	KOTA MADIUN	0.574	0.355	0.64	0.606	0.464	0.623	42.87
411	KOTA MAGELANG	0.253	0.238	0.255	0.375	0.246	0.315	29.4
412	KOTA MAKASSAR	0.226	0.223	0.246	0.29	0.225	0.268	10.24
413	KOTA MALANG	0.322	0.151	0.286	0.294	0.236	0.29	27.41
414	KOTA MANADO	0.234	0.218	0.3	0.292	0.226	0.295	9.23
415	KOTA MATARAM	0.056	0.081	0.061	0.109	0.068	0.085	4.33
416	KOTA MEDAN	0.04	0.027	0.022	0.027	0.034	0.025	2.64
417	KOTA METRO	0.259	0.19	0.28	0.363	0.225	0.321	21.85
418	KOTA MOJOKERTO	0.158	0.236	0.287	0.377	0.197	0.332	29.14
419	KOTA PADANG	0.153	0.259	0.153	0.208	0.206	0.18	18.76
420	KOTA PADANG PANJANG	0.118	0.283	0.237	0.47	0.2	0.353	30.74
421	KOTA PADANG SIDIMPUAN	0.151	0.268	0.127	0.209	0.21	0.168	0.43

422	KOTA PAGAR ALAM	0.08	0.125	0.098	0.174	0.102	0.136	12.59
423	KOTA PALEMBANG	0.095	0.11	0.129	0.205	0.103	0.167	14.78
424	KOTA PALOPO	0.097	0.12	0.104	0.211	0.109	0.157	14.28
425	KOTA PALU	0.179	0.294	0.231	0.439	0.236	0.335	30.54
426	KOTA PANGKAL PINANG	0.134	0.178	0.121	0.19	0.156	0.156	15.59
427	KOTA PARE PARE	0.173	0.135	0.256	0.278	0.154	0.267	23.32
428	KOTA PARIAMAN	0.11	0.171	0.121	0.211	0.141	0.166	11.19
429	KOTA PASURUAN	0.388	0.166	0.378	0.367	0.277	0.373	21.25
430	KOTA PAYAKUMBUH	0.133	0.159	0.126	0.215	0.146	0.171	16.32
431	KOTA PEKALONGAN	0.177	0.172	0.162	0.416	0.175	0.289	18.74
432	KOTA PEKANBARU	0.108	0.173	0.081	0.246	0.141	0.163	15.64
433	KOTA PEMATANG SIANTAR	0.187	0.244	0.257	0.509	0.216	0.383	26.91
434	KOTA PONTIANAK	0.459	0.207	0.322	0.388	0.333	0.355	34.85
435	KOTA PRABUMULIH	0.074	0.311	0.124	0.092	0.192	0.108	11.15
436	KOTA PROBOLINGGO	0.069	0.066	0.083	0.126	0.067	0.105	9.34
437	KOTA SABANG	0.187	0.186	0.086	0.192	0.187	0.139	3.8
438	KOTA SALATIGA	0.18	0.26	0.197	0.289	0.22	0.243	22.99
439	KOTA SAMARINDA	0.343	0.333	0.345	0.42	0.337	0.382	8.71
440	KOTA SAWAHLUNTO	0.239	0.176	0.167	0.214	0.207	0.19	16.17
441	KOTA SEMARANG	0.206	0.339	0.268	0.482	0.273	0.375	17.61
442	KOTA SERANG	0.194	0.207	0.269	0.248	0.201	0.258	10.35
443	KOTA SIBOLGA	0.114	0.176	0.136	0.189	0.145	0.162	15.72
444	KOTA SINGKAWANG	0.13	0.161	0.137	0.204	0.145	0.17	16.28
445	KOTA SOLOK	0.242	0.241	0.24	0.278	0.241	0.259	25.36
446	KOTA SORONG	0.159	0.184	0.115	0.177	0.172	0.146	9.19
447	KOTA SUBULUSSALAM	0.126	0.105	0.096	0.209	0.116	0.153	3.69
448	KOTA SUKABUMI	0.107	0.126	0.113	0.181	0.116	0.147	13.79
449	KOTA SUNGAI PENUH	0.094	0.112	0.046	0.131	0.103	0.089	9.06
450	KOTA SURABAYA	0.71	0.634	0.698	0.78	0.672	0.739	71.9
451	KOTA SURAKARTA	0.302	0.26	0.326	0.467	0.281	0.396	26.54
452	KOTA TANGERANG	0.197	0.202	0.2	0.269	0.2	0.234	9.46
453	KOTA TANGERANG SELATAN	0.04	0.037	0.028	0.041	0.038	0.035	3.57
454	KOTA TANJUNG BALAI	0.171	0.259	0.203	0.244	0.215	0.223	11.41
455	KOTA TANJUNG PINANG	0.148	0.179	0.141	0.252	0.163	0.196	18.65
456	KOTA TARAKAN	0.175	0.196	0.178	0.235	0.185	0.206	16.24
457	KOTA TASIKMALAYA	0.089	0.221	0.136	0.235	0.155	0.185	17.64
458	KOTA TEBING TINGGI	0.062	0.087	0.324	0.679	0.075	0.502	26.84
459	KOTA TEGAL	0.111	0.116	0.102	0.178	0.114	0.14	13.19
460	KOTA TERNATE	0.141	0.193	0.187	0.277	0.167	0.233	8.11
461	KOTA TIDORE KEP.	0.117	0.139	0.124	0.162	0.128	0.143	13.85
462	KOTA TOMOHON	0.065	0.046	0.073	0.037	0.055	0.055	5.51
463	KOTA TUAL	0.137	0.165	0.161	0.246	0.151	0.204	11.5
464	KOTA YOGYAKARTA	0.272	0.286	0.262	0.327	0.279	0.294	25.53
465	KAB. DAIRI	0.041	0.058	0.205	0.279	0.049	0.242	13.64
466	KAB. TAPANULI UTARA	0.01	0.022	0.047	0	0.016	0.023	1.09
467	KOTA PALANGKA RAYA	0.181	0.126	0.174	0.247	0.153	0.211	6.5
468	KAB. BARITO SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
469	KAB. BURU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
470	KAB. BUTON UTARA	0	0	0	0	0	0	0
471	KAB. DEIYAI	0	0	0	0	0	0	0
472	KAB. DOGIYAI	0	0	0	0	0	0	0
473	KAB. ENDE	0	0	0	0	0	0	0
474	KAB. INTAN JAYA	0	0	0	0	0	0	0

475	KAB. JAYAPURA	0	0	0	0	0	0	0
476	KAB. JAYAWIJAYA	0	0	0	0	0	0	0
477	KAB. KEEROM	0	0	0	0	0	0	0
478	KAB. KEP. TANIMBAR	0	0	0	0	0	0	0
479	KAB. KEP. YAPEN	0	0	0	0	0	0	0
480	KAB. LANNY JAYA	0	0	0	0	0	0	0
481	KAB. MALUKU BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0
482	KAB. MAMASA	0	0	0	0	0	0	0
483	KAB. MAMBERAMO TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
484	KAB. MAMUJU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
485	KAB. MANOKWARI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
486	KAB. NDUGA	0	0	0	0	0	0	0
487	KAB. PANIAI	0	0	0	0	0	0	0
488	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
489	KAB. PUNCAK JAYA	0	0	0	0	0	0	0
490	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0
491	KAB. SIMALUNGUN	0	0	0	0	0	0	0
492	KAB. TOLIKARA	0	0	0	0	0	0	0
493	KAB. TORAJA UTARA	0	0	0	0	0	0	0
494	KAB. YALIMO	0	0	0	0	0	0	0
495	KOTA BAUBAU	0	0	0	0	0	0	0

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI TKM PROVINSI

No	Provinsi	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	54.24	58.7	61.92	59.23	rendah
2	Sumatera Utara	54.29	58.91	61.99	59.36	rendah
3	Sumatera Barat	54.55	58.15	63.16	59.42	rendah
4	Riau	53.34	57.72	61.9	58.59	rendah
5	Jambi	53.28	56.82	60.89	57.77	rendah
6	Sumatera Selatan	56.08	60.59	63.1	60.86	rendah
7	Bengkulu	53.02	57.25	60.27	57.74	rendah
8	Lampung	53.95	58.4	61.23	58.79	rendah
9	Kepulauan Bangka Belitung	53.55	57.12	61.02	58	rendah
10	Kepulauan Riau	54.1	58.27	62.89	59.33	rendah
11	DKI Jakarta	51.41	55.61	61.89	57.23	rendah
12	Jawa Barat	53.93	57.81	63.24	59.19	rendah
13	Jawa Tengah	52.18	55.87	60.84	57.11	rendah
14	DI Yogyakarta	50.63	54.12	59.25	55.44	rendah
15	Jawa Timur	53.62	57.9	62.29	58.86	rendah
16	Banten	51.53	55.36	60.16	56.53	rendah
17	Nusa Tenggara Barat	56.04	60.04	64.85	61.19	rendah
18	Nusa Tenggara Timur	55.84	61.42	65.38	62.05	rendah
19	Kalimantan Barat	54.61	59.11	62.95	59.85	rendah
20	Kalimantan Tengah	51.25	55.56	59.18	56.24	rendah
21	Kalimantan Selatan	51.92	56.02	60.69	57.1	rendah
22	Kalimantan Timur	52.7	56.21	62.26	57.86	rendah
23	Kalimantan Utara	53.58	57.73	62.65	58.89	rendah
24	Sulawesi Utara	53.94	57.75	62.05	58.75	rendah
25	Sulawesi Tengah	54.1	58.88	62.54	59.51	rendah
26	Sulawesi Selatan	54.76	58.81	63.29	59.84	rendah
27	Sulawesi Tenggara	53.43	57.8	61.86	58.64	rendah
28	Gorontalo	54.18	58.36	62.37	59.2	rendah
29	Sulawesi Barat	44.54	47.95	51.21	48.63	sangat rendah
30	Maluku	51.94	57.05	59.94	57.38	rendah
31	Maluku Utara	55.61	60.26	63.2	60.66	rendah
32	Papua	46.79	48.77	56.24	51.12	rendah
33	Papua Barat	46.13	50.92	52.38	50.77	rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90

NILAI TKM KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	56.76	60.64	66.59	62.21	rendah
2	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	21.57	23.71	25.33	23.99	sangat rendah
3	Aceh	Kab. Aceh Besar	54.04	58.37	62.23	59.14	rendah
4	Aceh	Kab. Aceh Jaya	56.93	60.85	66.01	62.14	rendah
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan	58.52	63.82	67.49	64.4	rendah
6	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.65	59.29	62.44	59.77	rendah
7	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	55.97	62.41	64.33	62.2	rendah
8	Aceh	Kab. Aceh Tengah	54.2	58.77	62.19	59.35	rendah
9	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	56.03	60.05	64.72	61.15	rendah
10	Aceh	Kab. Aceh Timur	56.97	61.51	64.54	61.97	rendah
11	Aceh	Kab. Aceh Utara	55.25	60.11	62.25	60.21	rendah
12	Aceh	Kab. Bener Meriah	54.68	59.23	61.34	59.36	rendah
13	Aceh	Kab. Bireuen	54.65	59.63	64.47	60.65	rendah
14	Aceh	Kab. Gayo Lues	51.71	55.18	56.69	55.24	rendah
15	Aceh	Kab. Nagan Raya	53.71	58.72	59.83	58.43	rendah
16	Aceh	Kab. Pidie	59.11	63.66	69.08	64.96	rendah
17	Aceh	Kab. Pidie Jaya	58.67	61.89	65.09	62.6	rendah
18	Aceh	Kab. Simeulue	33.08	35.8	37.44	36.01	sangat rendah
19	Aceh	Kota Banda Aceh	55.89	61.2	65.28	61.91	rendah
20	Aceh	Kota Langsa	54.98	59.24	62.46	59.8	rendah
21	Aceh	Kota Lhokseumawe	57.28	60.94	67.9	62.9	rendah
22	Aceh	Kota Sabang	46.38	49.59	54.99	51.06	rendah
23	Aceh	Kota Subulussalam	31.69	33.71	37.03	34.61	sangat rendah
24	Sumatera Utara	Kab. Asahan	53.41	57.73	60.25	58.03	rendah
25	Sumatera Utara	Kab. Dairi	54.74	60.45	64.33	61.03	rendah
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	54.71	59.4	61.95	59.66	rendah
27	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	53.94	57.85	59.91	58.05	rendah
28	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	54.27	60.24	62.68	60.28	rendah
29	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	53.97	58.56	59.79	58.37	rendah
30	Sumatera Utara	Kab. Langkat	55.16	59.32	61.62	59.57	rendah
31	Sumatera Utara	Kab. Nias	59	65.62	68.04	65.58	sedang
32	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	19.52	21.58	22.63	21.67	sangat rendah
33	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	61.3	68.46	71.01	68.39	sedang
34	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	57.91	64.07	68.19	64.68	rendah
35	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	31.96	34.07	34.98	34.11	sangat rendah
36	Sumatera Utara	Kab. PakPak Bharat	55.17	59.97	63.11	60.42	rendah
37	Sumatera Utara	Kab. Samosir	56.11	59.74	63.79	60.68	rendah
38	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	54.23	58.48	61.65	59.02	rendah
39	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	52.48	57.24	60.19	57.62	rendah
40	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	56.51	60.6	63.87	61.2	rendah
41	Sumatera Utara	Kota Binjai	51.69	56.59	59.9	57.08	rendah
42	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	56.82	61.77	66.13	62.64	rendah
43	Sumatera Utara	Kota Medan	54.46	58.96	62.93	59.74	rendah
44	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	54.06	58.07	62.71	59.16	rendah
45	Sumatera Utara	Kota Sibolga	53.7	57.72	60.37	58.11	rendah
46	Sumatera Utara	Kota Tanjung balai	54.4	58.5	60.97	58.82	rendah
47	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	52.7	56.44	59.88	57.14	rendah
48	Sumatera Utara	Kab. Batu bara	54.99	59.09	61.34	59.33	rendah
49	Sumatera Utara	Kab. Karo	52.29	56.93	61.73	57.98	rendah

50	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	54.58	58.86	62.87	59.69	rendah
51	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	55.42	60.29	61.66	60.11	rendah
52	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	52.9	57.44	61.12	58.11	rendah
53	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	56.84	61.22	64.01	61.61	rendah
54	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	51.05	55.37	59.25	56.13	rendah
55	Sumatera Barat	Kab. Agam	53.98	56.54	63.15	58.52	rendah
56	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	53.77	56.97	60.75	57.87	rendah
57	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	55.05	60.49	63.03	60.64	rendah
58	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	53.21	56.47	62.92	58.29	rendah
59	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	52.55	55.42	60.29	56.74	rendah
60	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	54.72	58.35	60.96	58.78	rendah
61	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	57.26	60.6	66.59	62.26	rendah
62	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	58.21	61.86	66.02	62.85	rendah
63	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	55.19	58.39	64.96	60.27	rendah
64	Sumatera Barat	Kab. Solok	53.8	57.52	65.06	59.66	rendah
65	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	56.22	62.35	64.77	62.36	rendah
66	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	53.98	56.85	64.14	59.03	rendah
67	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	42.08	43.64	47.53	44.81	sangat rendah
68	Sumatera Barat	Kota Padang	55.21	59.24	63.49	60.19	rendah
69	Sumatera Barat	Kota Padang panjang	66.66	69.89	74.11	70.99	sedang
70	Sumatera Barat	Kota Pariaman	51.73	55.23	59.71	56.32	rendah
71	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	54.4	56.02	63.47	58.43	rendah
72	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	53.3	56.75	63.54	58.67	rendah
73	Sumatera Barat	Kota Solok	53.27	57.44	63.79	59.1	rendah
74	Riau	Kab. Bengkalis	54.22	58.29	61.88	59	rendah
75	Riau	Kab. Indragiri Hilir	53.81	58.45	63.45	59.57	rendah
76	Riau	Kab. Indragiri Hulu	51.98	56.61	62.94	58.19	rendah
77	Riau	Kab. Kampar	56.66	61.74	64.94	62.18	rendah
78	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	53.97	57.62	62.23	58.74	rendah
79	Riau	Kab. Kuantan Singingi	53.58	57.51	62.67	58.79	rendah
80	Riau	Kab. Pelalawan	50.76	55.98	59.38	56.45	rendah
81	Riau	Kab. Rokan Hilir	55.8	60.11	65.04	61.26	rendah
82	Riau	Kab. Rokan Hulu	54.29	58.19	61.32	58.77	rendah
83	Riau	Kab. Siak	54.3	58.33	61.83	59.02	rendah
84	Riau	Kota Dumai	53.89	56.74	61.7	58.1	rendah
85	Riau	Kota Pekanbaru	52.48	56.98	61.03	57.79	rendah
86	Jambi	Kab. Batanghari	55.32	57.1	62.74	58.85	rendah
87	Jambi	Kab. Bungo	24.17	26.29	27.7	26.49	sangat rendah
88	Jambi	Kab. Kerinci	55.9	60.17	65.3	61.4	rendah
89	Jambi	Kab. Merangin	53.65	58.38	62.33	59.12	rendah
90	Jambi	Kab. Muaro Jambi	54.57	57.97	61.9	58.9	rendah
91	Jambi	Kab. Sarolangun	54.99	58.47	62	59.24	rendah
92	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	53.82	57.41	62.28	58.64	rendah
93	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	51.46	53.83	57.76	54.9	rendah
94	Jambi	Kab. Tebo	17.68	18.85	20.69	19.34	sangat rendah
95	Jambi	Kota Jambi	51.72	55.93	61.26	57.22	rendah
96	Jambi	Kota Sungai Penuh	54.67	58.87	64.05	60.12	rendah
97	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	56.53	60.86	65.25	61.82	rendah
98	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	55.63	60.76	63.12	60.89	rendah
99	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	57.09	60.81	63.11	61.13	rendah
100	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	57.83	61.71	65.01	62.36	rendah
101	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	55.8	59.62	63.98	60.64	rendah

102	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	53.3	56.76	59.29	57.18	rendah
103	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	56.63	61.01	63.43	61.28	rendah
104	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	57.61	60.74	66	62.18	rendah
105	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	58.68	64.3	66.51	64.32	rendah
106	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	55.31	58.27	62.08	59.22	rendah
107	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.47	61.34	63.09	61.3	rendah
108	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	50.9	55.57	56.66	55.31	rendah
109	Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	55.65	60.85	63.94	61.23	rendah
110	Sumatera Selatan	Kota Lubuk linggau	54.38	58.97	62.86	59.71	rendah
111	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	55.5	59.69	61.38	59.72	rendah
112	Sumatera Selatan	Kota Palembang	55.54	60.54	63.72	60.98	rendah
113	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	58.66	63.38	64.9	63.29	rendah
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	54.09	59.45	61.84	59.56	rendah
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	54.44	58.6	61.49	59.05	rendah
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	55.44	58.45	62.28	59.4	rendah
117	Bengkulu	Kab. Kaur	58.53	63.11	65.79	63.44	rendah
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	52.23	55.85	59.21	56.54	rendah
119	Bengkulu	Kab. Lebong	52.7	55.82	58.5	56.34	rendah
120	Bengkulu	Kab. Muko Muko	21.66	23.15	24.8	23.53	sangat rendah
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	50.35	55.61	58.93	56.04	rendah
122	Bengkulu	Kab. Seluma	55.73	61.46	63.54	61.41	rendah
123	Bengkulu	Kota Bengkulu	54.05	58.25	62.26	59.09	rendah
124	Lampung	Kab. Lampung Barat	55.39	59.31	61.4	59.52	rendah
125	Lampung	Kab. Lampung Selatan	53.07	57.73	60.82	58.18	rendah
126	Lampung	Kab. Lampung Tengah	53.14	56.82	58.69	56.98	rendah
127	Lampung	Kab. Lampung Timur	53.27	58.56	61.17	58.75	rendah
128	Lampung	Kab. Lampung Utara	53.42	58.46	62.67	59.24	rendah
129	Lampung	Kab. Mesuji	54.58	59.05	61.57	59.33	rendah
130	Lampung	Kab. Pesawaran	52.57	56.84	60.15	57.42	rendah
131	Lampung	Kab. Pringsewu	54.68	58.39	62.81	59.45	rendah
132	Lampung	Kab. Tanggamus	54.32	58.64	61.74	59.15	rendah
133	Lampung	Kab. Tulang Bawang	54.61	58.05	60.87	58.58	rendah
134	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	53.55	57.53	60.02	57.86	rendah
135	Lampung	Kab. Way Kanan	57.37	61.57	63.85	61.82	rendah
136	Lampung	Kota Bandar Lampung	52.75	56.34	60.58	57.34	rendah
137	Lampung	Kota Metro	52.1	55.02	59.94	56.35	rendah
138	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	52.63	57.05	60.04	57.5	rendah
139	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	54.34	57.6	61.31	58.47	rendah
140	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	55.61	59.93	64.11	60.81	rendah
141	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	52.37	56.49	59.03	56.82	rendah
142	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	52.55	54.87	60.12	56.41	rendah
143	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	53.29	56.13	60.18	57.18	rendah
144	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	52.82	55.27	60.3	56.71	rendah
145	Kep. Riau	Kab. Bintan	50.97	55.58	58.74	56.05	rendah
146	Kep. Riau	Kab. Karimun	53.39	58.82	62.74	59.45	rendah
147	Kep. Riau	Kab. Kepulauan Anambas	54.74	59.87	64.86	60.92	rendah
148	Kep. Riau	Kab. Lingga	53.25	57.28	61.86	58.34	rendah
149	Kep. Riau	Kab. Natuna	53.67	58.14	62.06	58.91	rendah
150	Kep. Riau	Kota Batam	56.09	59.25	65.77	61.13	rendah
151	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	53.63	57.14	59.95	57.66	rendah
152	Dki Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	56.67	60.83	64.3	61.49	rendah
153	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	49.89	52.56	57.14	53.8	rendah

154	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	rendah
155	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	rendah
156	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	rendah
157	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	rendah
158	Jawa Barat	Kab. Bandung	53.37	57.05	61.68	58.18	rendah
159	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	54.66	58.21	63.8	59.69	rendah
160	Jawa Barat	Kab. Bekasi	53.13	57.65	62.41	58.7	rendah
161	Jawa Barat	Kab. Bogor	53.49	57.67	65.54	59.86	rendah
162	Jawa Barat	Kab. Ciamis	55.52	58.95	63.15	59.97	rendah
163	Jawa Barat	Kab. Cianjur	54.81	58.73	63.22	59.78	rendah
164	Jawa Barat	Kab. Cirebon	52	57.37	61.63	58.12	rendah
165	Jawa Barat	Kab. Garut	53.1	56.99	62.18	58.28	rendah
166	Jawa Barat	Kab. Indramayu	55.5	59.87	65.42	61.23	rendah
167	Jawa Barat	Kab. Karawang	53.49	58.25	62.62	59.13	rendah
168	Jawa Barat	Kab. Kuningan	54.18	57.71	64.57	59.64	rendah
169	Jawa Barat	Kab. Majalengka	52.1	56.63	62.01	57.89	rendah
170	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	55.18	60.63	64.09	61.1	rendah
171	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	53.81	56.82	64.28	59.03	rendah
172	Jawa Barat	Kab. Subang	57.26	61.69	68.89	63.62	rendah
173	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	56.39	61.56	68.83	63.41	rendah
174	Jawa Barat	Kab. Sumedang	56.18	60.5	64.88	61.46	rendah
175	Jawa Barat	Kota Bandung	54.44	56.75	64.76	59.26	rendah
176	Jawa Barat	Kota Banjar	52.32	56.1	60.57	57.15	rendah
177	Jawa Barat	Kota Bekasi	49.74	52.11	60.2	54.62	rendah
178	Jawa Barat	Kota Bogor	55.75	58.87	66.72	61.21	rendah
179	Jawa Barat	Kota Cirebon	52.54	56.52	62.81	58.18	rendah
180	Jawa Barat	Kota Depok	52.44	55.48	61.71	57.25	rendah
181	Jawa Barat	Kota Sukabumi	55.2	58.76	65.76	60.74	rendah
182	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	58.19	61.7	67.73	63.36	rendah
183	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	50.62	54.37	58.05	55.15	rendah
184	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	50.57	54.87	58.43	55.53	rendah
185	Jawa Tengah	Kab. Batang	52.35	54.98	62.29	57.19	rendah
186	Jawa Tengah	Kab. Blora	54.33	58.71	64.74	60.23	rendah
187	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	50.53	54.47	58.16	55.22	rendah
188	Jawa Tengah	Kab. Brebes	53.9	57.52	63.04	58.97	rendah
189	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	54.27	57.78	62.61	59.01	rendah
190	Jawa Tengah	Kab. Demak	54.34	58.15	61.72	58.89	rendah
191	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	51.07	56.35	58.66	56.43	rendah
192	Jawa Tengah	Kab. Jepara	52.72	56.61	62.04	57.99	rendah
193	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	52.39	56.08	61.41	57.45	rendah
194	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	53.55	57.39	63.81	59.12	rendah
195	Jawa Tengah	Kab. Kendal	58.18	62.45	68.51	64.01	rendah
196	Jawa Tengah	Kab. Klaten	53.84	56.46	63.26	58.5	rendah
197	Jawa Tengah	Kab. Kudus	51.92	56.19	61.85	57.59	rendah
198	Jawa Tengah	Kab. Magelang	51.18	55.32	59.04	56.06	rendah
199	Jawa Tengah	Kab. Pati	49.67	54.27	57.42	54.73	rendah
200	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	49.54	51.72	56.3	53.03	rendah
201	Jawa Tengah	Kab. Pemasang	56.72	60.63	65.05	61.67	rendah
202	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	51.89	55.06	60.05	56.38	rendah
203	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	51.95	55.77	60.29	56.83	rendah
204	Jawa Tengah	Kab. Rembang	50.6	56.16	60.04	56.74	rendah
205	Jawa Tengah	Kab. Semarang	48.72	52.11	56.28	53.1	rendah

206	Jawa Tengah	Kab. Sragen	52.34	55.69	61.15	57.15	rendah
207	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	52.42	56.52	63.57	58.43	rendah
208	Jawa Tengah	Kab. Tegal	52.03	55.2	60.73	56.71	rendah
209	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	53.1	56.01	61.7	57.62	rendah
210	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	52.05	55.23	60.21	56.55	rendah
211	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	52.68	56.06	60.89	57.3	rendah
212	Jawa Tengah	Kota Magelang	54.2	56.98	62.24	58.46	rendah
213	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	52.48	54.84	62.73	57.29	rendah
214	Jawa Tengah	Kota Salatiga	49.19	52.29	58.49	54.04	rendah
215	Jawa Tengah	Kota Semarang	53.89	56.63	63.07	58.53	rendah
216	Jawa Tengah	Kota Surakarta	51.58	55.03	61.88	56.96	rendah
217	Jawa Tengah	Kota Tegal	52.41	56.14	63.17	58.09	rendah
218	Di Yogyakarta	Kab. Bantul	50.78	55.06	59.23	55.93	rendah
219	Di Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	50.41	53.3	57.97	54.54	rendah
220	Di Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	51.92	55.42	61.55	57.09	rendah
221	Di Yogyakarta	Kab. Sleman	50.06	53	60.05	55.07	rendah
222	Di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	50.26	53.17	59.05	54.83	rendah
223	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	54.98	60.02	64.64	60.96	rendah
224	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	56.15	61.48	67.54	62.88	rendah
225	Jawa Timur	Kab. Blitar	50.2	55.09	58	55.43	rendah
226	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	53.29	58.38	62.5	59.12	rendah
227	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	51.5	55.81	59.38	56.47	rendah
228	Jawa Timur	Kab. Gresik	61.49	65.84	70.86	67.04	sedang
229	Jawa Timur	Kab. Jember	52.79	57.27	61.46	58.13	rendah
230	Jawa Timur	Kab. Jombang	53.28	56.86	63.47	58.69	rendah
231	Jawa Timur	Kab. Kediri	51.8	55.56	61.17	57.01	rendah
232	Jawa Timur	Kab. Lamongan	54.88	59.73	66.69	61.51	rendah
233	Jawa Timur	Kab. Lumajang	52.75	57.51	61.72	58.33	rendah
234	Jawa Timur	Kab. Madiun	53.92	57.82	63.06	59.13	rendah
235	Jawa Timur	Kab. Magetan	55.63	60.48	65.36	61.54	rendah
236	Jawa Timur	Kab. Malang	51.75	56.54	60.93	57.42	rendah
237	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	59.34	62.37	67.77	63.89	rendah
238	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	53.67	57.24	60.61	57.94	rendah
239	Jawa Timur	Kab. Ngawi	51.89	55.31	59.8	56.42	rendah
240	Jawa Timur	Kab. Pacitan	51.31	55.18	59.28	56.09	rendah
241	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	50.46	55.49	58.84	55.96	rendah
242	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	52.36	56.95	59.18	57.11	rendah
243	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	50.54	53.03	61	55.49	rendah
244	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	58.27	62.61	66.54	63.42	rendah
245	Jawa Timur	Kab. Sampang	56.46	60.41	64.1	61.18	rendah
246	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	53.4	56.71	61.73	58.03	rendah
247	Jawa Timur	Kab. Situbondo	54.95	58.58	63.06	59.67	rendah
248	Jawa Timur	Kab. Sumenep	51.8	55.59	60.08	56.65	rendah
249	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	51.98	56.7	60.94	57.54	rendah
250	Jawa Timur	Kab. Tuban	54.93	58.63	64.23	60.1	rendah
251	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	51.94	56.61	60.44	57.31	rendah
252	Jawa Timur	Kota Batu	51.03	55.3	60.99	56.71	rendah
253	Jawa Timur	Kota Blitar	46.96	52.59	60.25	54.47	rendah
254	Jawa Timur	Kota Kediri	51.25	54.89	59.39	55.97	rendah
255	Jawa Timur	Kota Malang	53.81	58.55	61.9	59.08	rendah
256	Jawa Timur	Kota Mojokerto	60.7	62.71	63.66	62.82	rendah
257	Jawa Timur	Kota Pasuruan	53.47	57.13	61.59	58.2	rendah

258	Jawa Timur	Kota Probolinggo	55.46	57.58	62.5	59.04	rendah
259	Jawa Timur	Kota Surabaya	70.72	79.57	82.47	79.42	sedang
260	Jawa Timur	Kota Madiun	58.98	62.56	70.49	64.88	rendah
261	Banten	Kab. Lebak	47.58	51.94	55.6	52.63	rendah
262	Banten	Kab. Pandeglang	51.91	57.13	61.14	57.82	rendah
263	Banten	Kab. Serang	48.26	51.76	58.75	53.72	rendah
264	Banten	Kab. Tangerang	53.94	57.3	61.87	58.46	rendah
265	Banten	Kota Cilegon	54.21	57.41	63.38	59.08	rendah
266	Banten	Kota Serang	30.97	33.3	37.98	34.62	sangat rendah
267	Banten	Kota Tangerang	55.7	59.41	64.13	60.57	rendah
268	Banten	Kota Tangerang Selatan	51.47	55.18	59.23	56.09	rendah
269	Bali	Kab. Badung	61.34	64.38	66.58	64.78	rendah
270	Bali	Kab. Buleleng	5.86	6.17	6.49	6.24	sangat rendah
271	Bali	Kab. Gianyar	54.46	58.17	62.02	59.02	rendah
272	Bali	Kab. Karangasem	53.65	58.14	58.65	57.71	rendah
273	Bali	Kab. Klungkung	54.07	57.19	60.43	57.92	rendah
274	Bali	Kab. Tabanan	54.6	57.74	60.11	58.16	rendah
275	Bali	Kota Denpasar	54.93	58.77	62.72	59.65	rendah
276	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	59.48	63.76	66.6	64.2	rendah
277	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	56.69	61.3	65.13	62.03	rendah
278	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	54.28	57.05	63.05	58.79	rendah
279	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	54.54	58.39	63.75	59.75	rendah
280	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	53.96	58.56	64.46	60	rendah
281	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	52.92	56.36	59.14	56.87	rendah
282	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	54.18	58.38	64.03	59.8	rendah
283	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	57.78	62.03	67.57	63.41	rendah
284	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	63.41	68.24	72.62	69.15	sedang
285	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	53.96	57.47	62.87	58.89	rendah
286	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	56.6	61.29	64.2	61.68	rendah
287	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	54.64	60.81	64.43	61.23	rendah
288	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	56.4	62.92	67.37	63.59	rendah
289	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	53.25	58.57	63.38	59.52	rendah
290	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	57.27	63.06	65.21	63.03	rendah
291	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	56.87	61.47	65.71	62.34	rendah
292	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	58.12	64.76	68.1	65.03	sedang
293	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	55.14	62.02	67.05	62.84	rendah
294	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	55.6	61.67	66.41	62.5	rendah
295	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	57.01	64.98	69.88	65.6	sedang
296	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	54.84	59.63	62.61	60.03	rendah
297	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	55.23	60	64.8	61.04	rendah
298	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	56.55	62.21	66.15	62.82	rendah
299	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	55.83	61.63	63.78	61.6	rendah
300	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	51.79	57.66	62.19	58.43	rendah
301	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	56.83	62.15	66.95	63.12	rendah
302	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	57.35	62.12	65.29	62.6	rendah
303	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	55.63	60.6	65.44	61.62	rendah
304	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	57.84	63.35	66.88	63.85	rendah
305	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	54.64	60.79	64.17	61.13	rendah
306	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	58.06	63.01	66.26	63.49	rendah
307	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	53.93	57.96	63.9	59.5	rendah
308	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	53.14	56.9	62.67	58.41	rendah
309	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	54.37	60.12	63.6	60.55	rendah

310	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51.86	56.35	58.06	56.34	rendah
311	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	66.36	69.36	70.64	69.46	sedang
312	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	52.5	58.04	63.34	59.13	rendah
313	Kalimantan Barat	Kab. Landak	54.18	59.16	62.38	59.61	rendah
314	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	52.03	57.98	59.17	57.58	rendah
315	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	54.88	58.17	63.33	59.54	rendah
316	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	50.98	55.89	60.96	56.99	rendah
317	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	64.27	67.79	68.7	67.68	sedang
318	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.69	57.09	60.34	57.63	rendah
319	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	50.65	56.37	60.58	57.05	rendah
320	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	57.69	60.27	66.45	62.11	rendah
321	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	55.03	58.5	64.7	60.22	rendah
322	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	3.89	4.27	4.7	4.37	sangat rendah
323	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	52.44	56.12	61.03	57.34	rendah
324	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	36.6	38.81	41.52	39.47	sangat rendah
325	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	54.98	59.34	62.95	60.02	rendah
326	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	53.83	57.9	62.41	58.93	rendah
327	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	53.27	56.88	63.8	58.82	rendah
328	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	52.35	57.61	60.43	57.87	rendah
329	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	53.07	57.77	61.27	58.36	rendah
330	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	55.1	60.96	64.98	61.58	rendah
331	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	50.18	53.2	57.55	54.32	rendah
332	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	53.91	58.33	61.03	58.68	rendah
333	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	53.87	58.92	62.17	59.37	rendah
334	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	17	18.27	19.62	18.57	sangat rendah
335	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	52.79	57	59.46	57.29	rendah
336	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	51.48	56.07	61.03	57.18	rendah
337	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	50.62	55.14	58.71	55.77	rendah
338	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	59.54	64.74	72.15	66.64	sedang
339	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	53.39	56.03	60.9	57.39	rendah
340	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	52.13	56.45	60.73	57.36	rendah
341	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	53.98	57.66	60.76	58.26	rendah
342	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	51.72	55.94	59.72	56.69	rendah
343	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	53.96	57.13	61.27	58.16	rendah
344	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	50.26	55.2	60.28	56.29	rendah
345	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	51.46	54.59	58.67	55.59	rendah
346	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	49.64	53.48	59.11	54.92	rendah
347	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	50.87	54.62	61.46	56.5	rendah
348	Kalimantan Timur	Kab. Berau	51.76	56	62.37	57.65	rendah
349	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	49.4	54.14	59.97	55.53	rendah
350	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	53.19	55.77	60.3	57.02	rendah
351	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	52.81	56.76	61.13	57.76	rendah
352	Kalimantan Timur	Kab. Paser	53.11	56.2	63.01	58.18	rendah
353	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	51.37	54.07	60.28	55.88	rendah
354	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	53.51	56.24	64.45	58.76	rendah
355	Kalimantan Timur	Kota Bontang	54.3	58.69	65.47	60.47	rendah
356	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	52.46	56.61	63.76	58.55	rendah
357	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	52.41	56.84	60.96	57.68	rendah
358	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	55.54	60.21	64.83	61.2	rendah
359	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	53.74	58.15	62.06	58.92	rendah
360	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	53.86	56.18	61.75	57.84	rendah
361	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	51.93	56.19	62.93	57.97	rendah

362	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	53.94	58.14	60.26	58.32	rendah
363	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	55.12	59.07	62.33	59.68	rendah
364	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	53.57	57.48	61.65	58.41	rendah
365	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	55.87	59.92	64.41	60.95	rendah
366	Sulawesi Utara	Kota Bitung	55.53	58.44	63.37	59.79	rendah
367	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	53.84	58	61.07	58.52	rendah
368	Sulawesi Utara	Kota Manado	53.17	57.69	63.02	58.94	rendah
369	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	51.02	54.59	58.35	55.42	rendah
370	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.98	58.47	62.16	59.3	rendah
371	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	53.57	57.41	60.05	57.82	rendah
372	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	54.53	58.8	63.61	59.91	rendah
373	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	55.27	61.12	64.77	61.6	rendah
374	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	53.7	56.84	62.57	58.43	rendah
375	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	55.5	59.6	64.68	60.83	rendah
376	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	53.43	56.24	61.39	57.67	rendah
377	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	54.85	59.19	64.72	60.55	rendah
378	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	54.54	58.81	64.51	60.23	rendah
379	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	55.98	60.37	64.08	61.09	rendah
380	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	56.15	61.37	64.13	61.63	rendah
381	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	53.73	58.27	63.15	59.36	rendah
382	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	52.67	57.89	60	57.92	rendah
383	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	52.86	57.7	61.53	58.38	rendah
384	Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	54.34	58.96	63.22	59.83	rendah
385	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	56.06	60.73	63.22	60.98	rendah
386	Sulawesi Tengah	Kota Palu	54.08	58.68	63.77	59.84	rendah
387	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	52.47	58.13	61.26	58.45	rendah
388	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	50.1	54.6	56.6	54.68	rendah
389	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	55.77	60.52	63.07	60.78	rendah
390	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	55.91	58.26	62.4	59.41	rendah
391	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	54.37	58.35	63.18	59.51	rendah
392	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	54.81	58.55	63.17	59.67	rendah
393	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	56.55	60.72	64.92	61.63	rendah
394	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	56.57	60.4	66.1	61.89	rendah
395	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	54.66	59.05	61.71	59.39	rendah
396	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	57.38	61.21	65.51	62.22	rendah
397	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	52.19	55.25	59.25	56.24	rendah
398	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	55.69	59.47	63.59	60.41	rendah
399	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	55.19	59.04	65.27	60.71	rendah
400	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	54.73	59.84	64.12	60.65	rendah
401	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	56.54	59.02	65.72	61.05	rendah
402	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	55.77	60.17	65.68	61.51	rendah
403	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	53.62	57.47	60.64	58.06	rendah
404	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	55.61	60.23	66.99	61.98	rendah
405	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	53.86	58.57	60.92	58.76	rendah
406	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	58.66	61.97	68.34	63.78	rendah
407	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	53.48	58.21	61.6	58.76	rendah
408	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	51.76	56.62	60	57.14	rendah
409	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	54.96	59.9	64.25	60.76	rendah
410	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	53.48	57.98	62.75	59.04	rendah
411	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	53.26	57.15	61.64	58.2	rendah
412	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	52.91	56.24	62.51	57.99	rendah
413	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	55.41	60.6	63.64	60.96	rendah

414	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	56.64	61.82	66.35	62.71	rendah
415	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	57.83	62.6	68.13	63.9	rendah
416	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	33.61	36.75	39.35	37.24	sangat rendah
417	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	52.71	56.51	58.85	56.82	rendah
418	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	53	57.29	59.35	57.43	rendah
419	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	54.17	59.05	62.55	59.62	rendah
420	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	56.74	61.74	66.11	62.6	rendah
421	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	56.23	59.67	63.18	60.45	rendah
422	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	54.02	57.63	61.15	58.38	rendah
423	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	9.98	10.73	11.22	10.8	sangat rendah
424	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	57.81	62.66	67.39	63.67	rendah
425	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	50.3	54.77	58.65	55.51	rendah
426	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	21.84	23.5	25.9	24.12	sangat rendah
427	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	57.25	61.4	68	63.17	rendah
428	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	42.59	46.72	51.16	47.72	sangat rendah
429	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	55.89	61.6	66.84	62.66	rendah
430	Gorontalo	Kab. Boalemo	53.8	58.64	61.65	59.04	rendah
431	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	54.74	59.15	65.58	60.81	rendah
432	Gorontalo	Kab. Gorontalo	54.7	58.68	61.05	58.98	rendah
433	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	53.47	58.31	62.12	58.99	rendah
434	Gorontalo	Kab. Pohuwato	53.85	57.96	61.83	58.76	rendah
435	Gorontalo	Kota Gorontalo	54.33	57.38	62.08	58.62	rendah
436	Sulawesi Barat	Kab. Majene	54.6	58.7	63.81	59.94	rendah
437	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	6.61	7.41	8.06	7.52	sangat rendah
438	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	25.86	28.4	30.64	28.84	sangat rendah
439	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	10.1	10.27	11.63	10.73	sangat rendah
440	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	40.88	44.31	46.36	44.56	sangat rendah
441	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	54.9	58.8	62.23	59.48	rendah
442	Maluku	Kab. Buru	61.3	66.58	70.29	67.19	sedang
443	Maluku	Kab. Buru Selatan	17.75	19.25	20.77	19.58	sangat rendah
444	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	55.79	61.76	63.18	61.45	rendah
445	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	7.07	7.78	8.37	7.89	sangat rendah
446	Maluku	Kab. Maluku Tengah	53.5	58.47	62.04	59.05	rendah
447	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	57.04	62.69	66.37	63.22	rendah
448	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.61	4.89	5.14	4.94	sangat rendah
449	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	30.5	32.96	34.25	33.08	sangat rendah
450	Maluku	Kota Ambon	53.5	59.65	62.36	59.75	rendah
451	Maluku	Kota Tual	56.53	61.81	66.23	62.65	rendah
452	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	56.13	60.34	63.97	61.05	rendah
453	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	56.37	61.57	64.2	61.79	rendah
454	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	55.28	60.05	62.1	60.13	rendah
455	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	54.64	60.21	63.08	60.46	rendah
456	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	55.91	60.32	62.15	60.37	rendah
457	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	54.84	59.23	62.09	59.64	rendah
458	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	56.49	60.96	64.55	61.62	rendah
459	Maluku Utara	Kota Ternate	54.59	59.01	63.49	59.99	rendah
460	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	54.91	58.92	62.49	59.63	rendah
461	Papua	Kab. Jayapura	1.22	1.13	1.07	1.12	sangat rendah
462	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0.27	0.32	0.29	0.3	sangat rendah
463	Papua	Kab. Sarmi	3.66	3.92	4.28	4.01	sangat rendah
464	Papua	Kab. Supiori	50.94	53.09	61.25	55.66	rendah
465	Papua	Kota Jayapura	1.01	1.21	1.12	1.15	sangat rendah

466	Papua	Kab. Waropen	0.14	0.15	0.12	0.14	sangat rendah
467	Papua	Kab. Keerom	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
468	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	43.62	47.14	51.15	48.07	sangat rendah
469	Papua Barat Daya	Kota Sorong	36.67	40.13	44.83	41.3	sangat rendah
470	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0.32	0.34	0.36	0.34	sangat rendah
471	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1.01	1.33	1.56	1.36	sangat rendah
472	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0.11	0.1	0.12	0.11	sangat rendah
473	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
474	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0
475	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	0	0	0	0	0
476	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0	0	0	0	0
477	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0.21	0.25	0.25	0.25	sangat rendah
478	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0	0	0	0	0
479	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1.08	1.06	1.19	1.11	sangat rendah
480	Papua Barat	Kab. Fakfak	53.7	58.78	60.99	58.86	rendah
481	Papua Barat	Kab. Manokwari	49.51	53.93	60.33	55.57	rendah
482	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	23.36	25.37	27.27	25.77	sangat rendah
483	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	49.36	56.21	52.57	53.98	rendah
484	Papua Barat	Kab. Kaimana	54.06	59.42	61.3	59.35	rendah
485	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	19.68	21.19	22.26	21.36	sangat rendah
486	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	12.12	13.47	13.56	13.32	sangat rendah
487	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
488	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0.14	0.16	0.19	0.17	sangat rendah
489	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0.27	0.3	0.24	0.27	sangat rendah
490	Papua Tengah	Kab. Mimika	49.25	54.26	59.53	55.41	rendah
491	Papua Tengah	Kab. Paniai	0.16	0.15	0.11	0.14	sangat rendah
492	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0
493	Papua Selatan	Kab. Merauke	8.41	9.42	9.65	9.37	sangat rendah
494	Papua Selatan	Kab. Mappi	3.25	3.6	3.71	3.59	sangat rendah
495	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0.14	0.19	0.25	0.21	sangat rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90